



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I 2026



BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPBAP Ujung Batee Tahun 2026 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada BPBAP Ujung Batee dalam kurun waktu Tahun 2026. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi BPBAP Ujung Batee dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Aceh Besar, 17 April 2026



Wawan Cahyono Ashuri



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Sumber Daya Manusia	3
1.5. Potensi dan Permasalahan Perikanan Budidaya	5
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	6
BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	8
2.1. Sasaran Kegiatan.....	8
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2026.....	8
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026.....	10
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2. Analisis Capaian Kinerja	13
1. SK-2: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	13
2. SK-2: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	29
3. SK-3: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	31
4. SK-4: Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	33
5. SK-5: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di BPBAP Ujung Batee.....	34
3.3. Kinerja Anggaran.....	49
BAB 4. PENUTUP	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber daya manusia berdasarkan jabatan.....	3
Tabel 2. Penetapan kinerja tahun 2026.....	9
Tabel 3. Capaian indikator triwulan I tahun 2026	12
Tabel 4. Capaian Indikator: Sampel uji laboratorium kesehatan ikan.....	13
Tabel 5. Perbandingan capaian sampel uji laboratorium antar UPT Air Payau.....	13
Tabel 6. Capaian Indikator: Calon induk unggul udang yang disalurkan ke masyarakat	14
Tabel 7. Perbandingan capaian bantuan calon induk udang antar UPT air payau	15
Tabel 8. Capaian Indikator: Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat.....	16
Tabel 9. Perbandingan capaian bantuan benih ikan payau antar UPT air payau.....	16
Tabel 10. Capaian Indikator: Benih ikan udang yang disalurkan ke masyarakat.....	17
Tabel 11. Perbandingan capaian bantuan benih ikan udang antar UPT air payau	18
Tabel 12. Capaian Indikator: Sampel monitoring penyakit ikan.....	19
Tabel 13. Perbandingan capaian sampel monitoring penyakit ikan antar UPT air payau	19
Tabel 14. Capaian Indikator: Sampel surveilan resistensi antimikroba.....	20
Tabel 15. Perbandingan capaian sampel antimikrobal resisten antar UPT air payau ..	21
Tabel 16. Capaian Indikator: Calon induk unggul ikan air payau yang diproduksi.....	22
Tabel 17. Perbandingan capaian produksi calon induk ikan air payau.....	23
Tabel 18. Capaian Indikator: Calon induk unggul udang yang diproduksi	24
Tabel 19. Perbandingan capaian produksi calon induk udang antar UPT air payau	24
Tabel 20. Capaian Indikator: Pakan ikan yang diproduksi	25
Tabel 21. Perbandingan capaian produksi pakan ikan antar UPT air payau	26
Tabel 22. Capaian Indikator: Benih ikan air payau yang diproduksi.....	27



Tabel 23. Perbandingan capaian produksi benih ikan payau antar UPT air payau	27
Tabel 24. Capaian Indikator: Benih udang yang diproduksi	28
Tabel 25. Perbandingan capaian produksi benih udang antar UPT air payau	28
Tabel 26. Capaian Indikator: Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat	30
Tabel 27. Perbandingan capaian benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	30
Tabel 28. Capaian Indikator: Peralatan laboratorium pengujian yang disediakan	31
Tabel 29. Perbandingan capaian penyediaan peralatan laboratorium	32
Tabel 30. Capaian Indikator: Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan	33
Tabel 31. Perbandingan capaian penyaluran sarana budidaya antar UPT air payau....	33
Tabel 32. Capaian Indikator: Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan.....	35
Tabel 33. Perbandingan capaian Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan	35
Tabel 34. Capaian Indikator: Nilai penilaian mandiri SAKIP	36
Tabel 35. Capaian Indikator: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	37
Tabel 36. Capaian Indikator: Nilai kinerja perencanaan anggaran.....	39
Tabel 37. Capaian Indikator: Indeks profesionalitas ASN	40
Tabel 38. Capaian Indikator: Nilai pengawasan kearsipan internal	41
Tabel 39. Capaian Indikator: Persentase rencana umum pengadaan.....	43
Tabel 40. Capaian Indikator: Indeks pengelolaan SDM	44
Tabel 41. Capaian Indikator: Pelayanan keterbukaan informasi publik.....	45
Tabel 42. Capaian Indikator: Persentase layanan perkantoran.....	46
Tabel 43. Capaian Indikator: Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk menuju WBK..	48
Tabel 44. Pagu anggaran tahun 2022-2026	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPAP Ujung Batee	2
Gambar 2. Sumber daya manusia berdasarkan jabatan	4
Gambar 3. Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan	4
Gambar 4. Potensi perikanan budidaya.....	5
Gambar 5. Tangkapan layar aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026.....	11
Gambar 6. Alokasi jenis belanja dan sumber dana belanja tahun 2026	50
Gambar 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022-2026	50
Gambar 8. Target dan Realisasi PNBK Tahun 2022-2026	51

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPBAP Ujung Batee Triwulan I Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan. Selain itu, sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan. Untuk wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas maka dilakukan perjanjian kinerja sebagai pernyataan komitmen, tekad dan janji untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur, serta didukung sumber daya anggaran yang memadai. Alokasi anggaran tahun 2026 awalnya sebesar Rp 20.665.614.000, setelah berjalannya waktu mengalami realokasi ke satker lain, sehingga pagu akhir sampai 31 Maret 2025 sebesar Rp 19.042.020.000 dengan realisasi Rp 15.793.357.050 (18,76 %). Perjanjian kinerja telah ditetapkan 5 Sasaran Kegiatan dan 25 indikator kinerja kegiatan, dan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPBAP Ujung Batee sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sesuai aplikasi “kinerjaku” adalah sebesar 109,22. Dari 25 indikator kinerja yang telah dilaksanakan dan dilakukan pengukuran capaian terdapat 6 indikator telah mencapai target yaitu:

1. Sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air payau oleh BPBAP Ujung Batee tercapai 603,03 %.
2. Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji oleh BPBAP Ujung Batee tercapai 100 %.
3. Sampel surveilan resistensi antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau yang diuji oleh BPBAP Ujung Batee tercapai 240 %.
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 113,33 %.
5. Rencana umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 129,87 %.
6. Pelayanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 100%.

Selanjutnya ada 2 indikator yang belum mencapai target yaitu:

1. Benih ikan udang yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee hanya tercapai 99,97 %.
2. Benih udang yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee hanya tercapai 96,70 %.

Sedangkan indikator kinerja yang belum ada capaian karena tidak ditargetkan sebanyak 17 indikator, yaitu:

1. Calon induk unggul udang yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee



2. Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee
3. Calon induk unggul ikan air payau yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee
4. Calon induk unggul udang yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee
5. Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh BPBAP Ujung Batee
6. Benih ikan air payau yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee
7. Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee
8. Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBAP Ujung Batee
9. Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee
10. Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee
11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee
12. Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee
13. Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee
14. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee
15. Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee
16. Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee
17. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK Satker BPBAP Ujung Batee

Pencapaian terhadap beberapa indikator kinerja pada periode selanjutnya perlu senantiasa dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta kerja keras pada beberapa kegiatan pendukung indikator kinerja dimaksud serta melakukan penyempurnaan kebijakan internal yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja. Dengan demikian, diharapkan di masa yang akan datang dapat terjadi peningkatan capaian kinerja yang lebih optimal melalui kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan secara efektif dan efisien.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, telah mengamanatkan untuk terus melakukan pembangunan perikanan budidaya secara berkelanjutan, karena diyakini dengan potensi dan kekuatan yang ada, perikanan budidaya mampu memberi kontribusi pada misi Asta Cita pemerintah, diantaranya mewujudkan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya, lebih lanjut dituangkan dalam buku Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budidaya 2025-2029. Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam beberapa perspektif dengan masing-masing indikator kinerja seperti yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

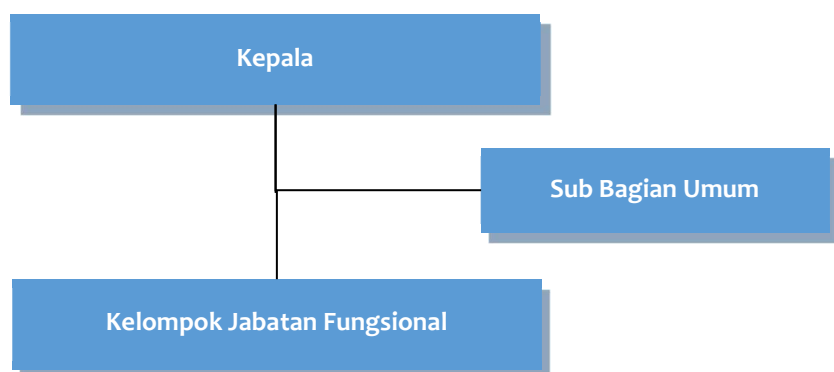
Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Balai Budidaya Perikanan Air Payau Ujung Batee (BPBAP) Ujung Batee. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BPBAP Ujung Batee Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan

suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budi daya ke depan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya, disebutkan bahwa tugas Balai Budidaya Perikanan Air Payau (salah satunya BPBAP Ujung Batee) adalah ***“melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya air payau”***. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPBAP Ujung Batee mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya air payau;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air payau;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air payau;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;
7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau; dan
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPBAP Ujung Batee

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau terdiri atas: a) Subbagian Umum; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan

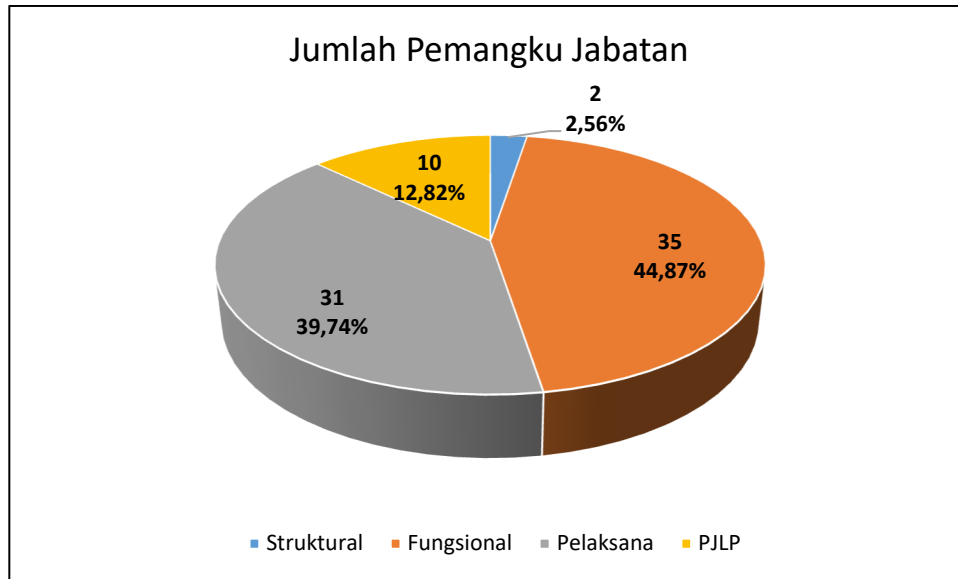
penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.4. Sumber Daya Manusia

Total keseluruhan pegawai BPBAP Ujung Batee sebanyak 78 orang, dengan rincian status PNS sebanyak 41 orang dan PPPK sebanyak 26 orang dan PJLP sebanyak 10 orang. Pegawai yang berstatus PNS didominasi oleh fungsional tertentu sebanyak 35 orang, sementara pelaksana hanya sebanyak 41 orang, PJLP sebanyak 10 orang, dan pejabat struktural 2 orang.

Tabel 1. Sumber daya manusia berdasarkan jabatan

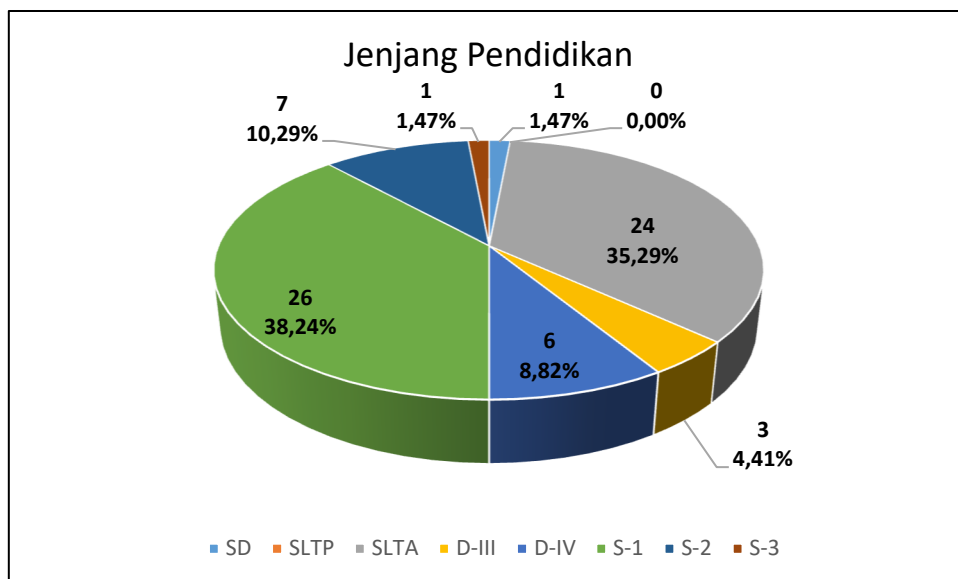
No	Jabatan	Nama/Jenjang Jabatan		PNS (orang)	PPPK (orang)	PJLP (orang)
1	Struktural	1	Kepala Balai	1		
		2	Kepala Sub Bagian Umum	1		
2	Fungsional	1	Analisis Akuakultur Ahli Madya	4		
		2	Analisis Akuakultur Ahli Muda	5		
		3	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	3	7	
		4	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	2		
		5	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	1	2	
		6	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1		
		7	Teknisi Akuakultur Mahir	4		
		8	Teknisi Akuakultur Pemula		2	
		9	Teknisi Akuakultur Terampil	2		
		10	Teknisi Kesehatan Ikan Penyelia	1		
		11	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	1		
3	Pelaksana	1	Penelaah Teknis Kebijakan	1		
		2	Operator Layanan Operasional		9	
		3	Penata Layanan Operasional		1	
		4	Pengadministrasi Barang Milik Negara	1		
		5	Pengadministrasi Perkantoran		3	
		6	Pengelola Keuangan	1		
		8	Pengelola Laboratorium	1		
		9	Pengelola Layanan Operasional		1	
		10	Pengelola Surat	1		
		11	Pengelola Umum Operasional		1	
		12	Penyusun Laporan Keuangan	1		
		13	Teknisi Listrik dan Jaringan	1		
		14	Teknisi Perikanan Budidaya	9		
		15	PJLP			10
		Jumlah				42



Gambar 2. Sumber daya manusia berdasarkan jabatan

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia BPBAP Ujung Batee adalah sebagai berikut:

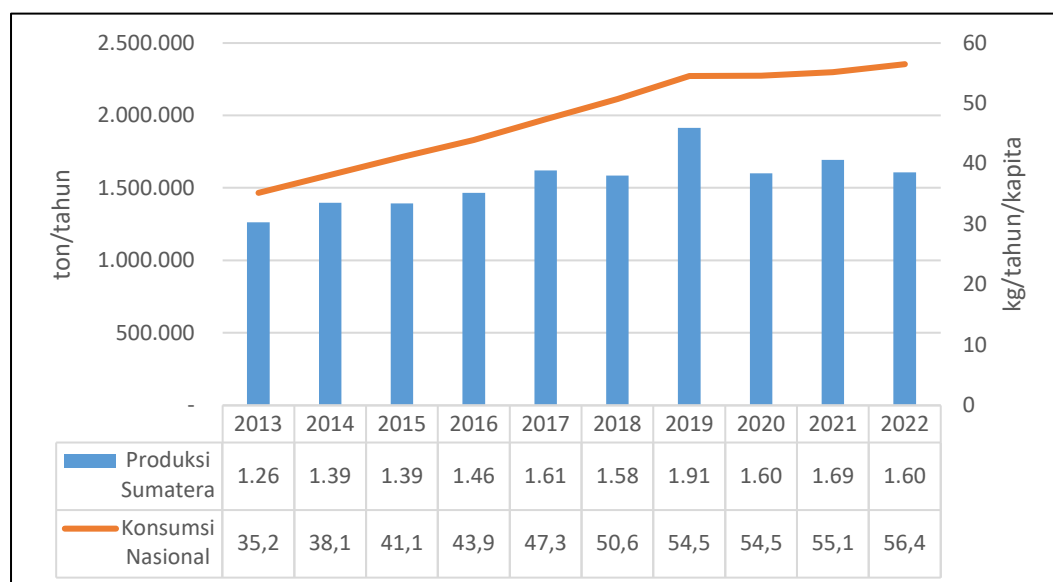
- S3 sebanyak 1 orang atau 1,47 % dari jumlah SDM
- S2 sebanyak 7 orang atau 10,29 % dari jumlah SDM
- S1 sebanyak 26 orang atau 38,24 % dari jumlah SDM
- D4 sebanyak 6 orang atau 8,82 % dari jumlah SDM
- D3 sebanyak 3 orang atau 4,41 % dari jumlah SDM
- SLTA sebanyak 24 orang atau 35,29 % dari jumlah SDM
- SLTP sebanyak tidak ada
- SD sebanyak 1 orang atau 1,47 % dari jumlah SDM.



Gambar 3. Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan

1.5. Potensi dan Permasalahan Perikanan Budidaya

Selama 10 tahun terakhir konsumsi ikan secara nasional mengalami peningkatan sebesar 60,41 %, tahun 2013 hanya 35,2 kg/tahun/kapita menjadi 56,4 kg/tahun/kapita di 2022. Sementara volume produksi perikanan budidaya untuk wilayah Sumatera (sebagai wilayah kerja BPBAP Ujung Batee) hanya meningkat sebesar 27,25 % dari tahun 2013 hanya 1,26 juta ton/tahun menjadi 1,6 juta ton/tahun di 2022, tidak mengalami peningkatan yang sebanding dengan konsumsi ikan nasional yang mencapai peningkatan sebesar 60,41 % (sumber data diolah dari <https://statistik.kkp.go.id>). Adanya ketimpangan antara kebutuhan konsumsi ikan nasional dengan volume produksi menjadi potensi bagi BPBAP Ujung Batee untuk mendukung peningkatan volume produksi, melalui penyediaan induk dan benih yang berkualitas maupun bimbingan teknis perikanan budidaya.



Gambar 4. Potensi perikanan budidaya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budidaya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu permasalahan internal dan eksternal.

- a. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi : (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (v) pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi) cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan) belum optimal diterapkan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan (vii) kondisi

infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

- b. Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) ruang untuk usaha perikanan budi daya belum ada kepastian memadai, (ii) regulasi dan perizinan lintas sektoral belum begitu simetrik sehingga menghambat perkembangan usaha perikanan budi daya, dan (iii) perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan.

Lebih spesifik lagi permasalahan yang dihadapi BPBAP Ujung Batee yaitu adanya ketimpangan antara sumber daya (baik SDM maupun dukungan anggaran) dengan luas wilayah kerja. Wilayah kerja BPBAP Ujung Batee mencakup seluruh Sumatera yang begitu luas. Anggaran hanya cukup mengakomodir kegiatan di Aceh dan Sumut, selain itu instalasi budi daya perikanan BPBAP Ujung Batee hanya satu dan berada di Aceh Besar, sehingga sulit untuk menjangkau wilayah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, maupun Lampung.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, telah dirangkum beberapa kendala dan permasalahan dalam pencapaian target-target kinerja pada tahun tersebut, yaitu:

1. Sumber daya manusia: jumlah pegawai terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun baik pensiun maupun mutasi, sementara penambahan dari pengadaan CPNS/PPPK maupun dari mutasi dari instansi lain tidak sebanding.
2. Pendidikan dan latihan: ketersediaan pendidikan dan latihan masih terbatas dan kurang variatif terhadap kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
3. Sarana dan prasarana: baik gedung, kolam, maupun peralatan butuh banyak pemeliharaan, jika terus digunakan akan mempengaruhi kualitas output.
4. Kebijakan yang terus berubah: perkembangan zaman, tuntutan publik, maupun perkembangan teknologi mendorong perubahan kebijakan. Sementara untuk memenuhi hal tersebut butuh waktu sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja pada periode tersebut

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj BPBAP Ujung Batee Triwulan I Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBAP Ujung Batee selama kurun waktu Januari 2026 sampai dengan Maret 2026.



2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBAP Ujung Batee serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBAP Ujung Batee, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, serta pengukuran/pengelolaan kinerja BPBAP Ujung Batee.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi indikator kinerja BPBAP Ujung Batee serta evaluasi dan analisis kinerja Tahun 2026. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Sesuai Rencana Kerja Anggaran bahwa BPBAP Ujung Batee memiliki sasaran kegiatan yaitu Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau, Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut, Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar, Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya, dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen. Sehingga dapat dijabarkan bahwa sasaran kegiatan menjadi

- Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau
- Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut
- Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar
- Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya
- Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di BPBAP Ujung Batee

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja telah dilakukan beberapa langkah, yaitu: (i) Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tahun 2026 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan selama satu tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) Perjanjian Kinerja (PK); dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2026.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja BPBAP Ujung Batee tahun 2026 dituangkan dalam perjanjian kinerja (sebagai mana terlampir pada Lampiran 1).



Tabel 2. Penetapan kinerja tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Satuan
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1.	Sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air payau oleh BPBAP Ujung Batee	200	Sampel
		2.	Calon induk unggul udang yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	2.136	Ekor
		3.	Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	1.207.320	Ekor
		4.	Benih ikan udang yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	11.472.302	Ekor
		5.	Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji oleh BPBAP Ujung Batee	60	Sampel
		6.	Sampel surveilan resistensi antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau yang diuji oleh BPBAP Ujung Batee	25	Sampel
		7.	Calon induk unggul ikan air payau yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee	866	Ekor
		8.	Calon induk unggul udang yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee	20.515	Ekor
		9.	Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh BPBAP Ujung Batee	3.448	Kg
		10.	Benih ikan air payau yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee	300.000	Ekor
		11.	Benih udang yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee	4.500.000	Ekor
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	12.	Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	217.388	Ekor
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	13.	Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBAP Ujung Batee	1	Unit
4.	Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	14.	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	23	Unit
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di BPBAP Ujung Batee	15.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee	86	Persen
		16.	Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee	84,20	Nilai
		17.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee	92,10	Nilai
		18.	Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee	71,75	Nilai
		19.	Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee	81,50	Indeks
		20.	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee	81	Nilai
		21.	Rencana umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAP Ujung Batee	77	Persen
		22.	Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee	4	Indeks
		23.	Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee	81	Nilai
		24.	Pelayanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee	100	Persen
		25.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK Satker BPBAP Ujung Batee	76	Nilai

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026

Pengukuran capaian kinerja BPBAP Ujung Batee mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan memasukkan data realisasi Indikator Kinerja dan dokumen pendukungnya pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja.

Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup BPBAP Ujung Batee) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan data realisasi Indikator Kinerja dan dokumen pendukung dilakukan verifikasi oleh level I.

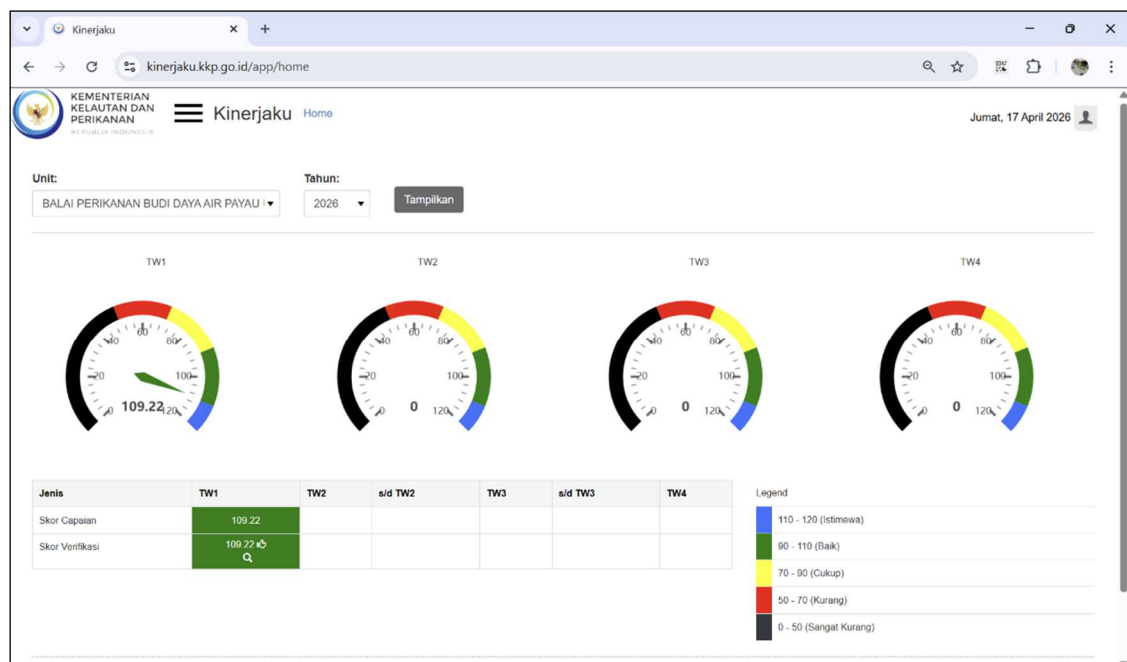
Status capaian Indikator Kinerja yang ada dalam aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> ditunjukkan dengan warna: (i) hitam, kategori sangat kurang (untuk nilai <50); (ii) merah, kategori kurang (nilai 50 - <70); (iii) kuning, kategori cukup (nilai 70 - <90); (iv) hijau, kategori baik (nilai 90 - <110); dan (v) biru, kategori istimewa (nilai 110 – 120).

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual indikator kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budi daya pada Tahun 2026 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPBAP Ujung Batee menitikberatkan pada 5 Sasaran Kegiatan dengan 25 indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKJ). Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” diperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 109,22. Adapun rekapitulasi capaian kinerja BPBAP Ujung Batee pada Triwulan I Tahun 2026 seperti pada tabel berikut.



Gambar 5. Tangkapan layar aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>, terlihat bahwa Nilai Capaian Kinerja BPBAP Ujung Batee sebesar 109,22 yang berada dalam kategori BAIK. Artinya secara umum indikator kinerja sudah mencapai target.

Capaian target indikator kinerja Triwulan I Tahun 2026, menunjukkan bahwa sebanyak 6 indikator yang telah mencapai maupun melampaui target, sedangkan yang belum mencapai target sebanyak 2 indikator, dan sebanyak 17 indikator yang belum ada capaian. Secara umum indikator kinerja BPBAP Ujung Batee telah tercapai. Begitu pun pada capaian kinerja secara keseluruhan terlihat capaian target mencapai 109,22 (dapat dilihat pada Gambar 5).



Tabel 3. Capaian indikator triwulan I tahun 2026

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2026	Satuan	Target s/d Tw. I	Realisasi s/d Tw. I	Capaian Terhadap Target Tw. I
1.	Sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air payau oleh BPBAP Ujung Batee	200	Sampel	33	199	603,03
2.	Calon induk unggul udang yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	2.136	Ekor	-	-	-
3.	Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	1.207.320	Ekor	-	-	-
4.	Benih ikan udang yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	11.472.302	Ekor	2.800.000	2.799.080	99,97
5.	Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji oleh BPBAP Ujung Batee	60	Sampel	12	12	100,00
6.	Sampel surveilan resistensi antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau yang diuji oleh BPBAP Ujung Batee	25	Sampel	5	12	240,00
7.	Calon induk unggul ikan air payau yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee	866	Ekor	-	-	-
8.	Calon induk unggul udang yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee	20.515	Ekor	-	-	-
9.	Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh BPBAP Ujung Batee	3.448	Kg	-	-	-
10.	Benih ikan air payau yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee	300.000	Ekor	-	-	-
11.	Benih udang yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee	4.500.000	Ekor	1.000.000	967.000	96,70
12.	Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	217.388	Ekor	-	-	-
13.	Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBAP Ujung Batee	1	Unit	-	-	-
14.	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	23	Unit	-	-	-
15.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee	86	Persen	86	97,46	113,33
16.	Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee	84,20	Nilai	-	-	-
17.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee	92,10	Nilai	-	-	-
18.	Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee	71,75	Nilai	-	-	-
19.	Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee	81,50	Indeks	-	-	-
20.	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee	81	Nilai	-	-	-
21.	Rencana umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAP Ujung Batee	77	Persen	77	100	129,87
22.	Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee	4	Indeks	-	-	-
23.	Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee	81	Nilai	-	-	-
24.	Pelayanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee	100	Persen	100	100	100,00
25.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK Satker BPBAP Ujung Batee	76	Nilai	-	-	-

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan indikator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut:

1. SK-2: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau

IK-6: Sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air payau oleh BPBAP Ujung Batee

Layanan pengujian sampel yang dilakukan oleh laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan BPBAP Ujung Batee berdasarkan tujuan pemeriksaan terdiri dari pengujian Kualitas Air, Mikrobiologi, dan Biologi Molekuler. Jumlah yang dihitung sebagai capaian adalah banyak sampel pengujian yang masuk baik secara internal maupun eksternal, bukan berdasarkan banyaknya kegiatan pengujian di setiap parameter yang mampu diselesaikan oleh laboratorium uji. Jumlah capaian dihitung dari jumlah sampel kualitas air + jumlah sampel mikrobiologi + jumlah sampel biologi molekuler (yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium).

Tabel 4. Capaian Indikator: Sampel uji laboratorium kesehatan ikan

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
150	352	234,67	33	199	603,03	56,53	200	99,5

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Realisasi persentase sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan air payau berhasil mencapai target Triwulan I tahun 2026 yaitu sebesar 603,03 % dan mencapai sebesar 99,5 % dari target tahunan. Realisasi persentase sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan air payau mengalami peningkatan pengujian sebesar 56,53 % apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2025. Capaian pada Triwulan I tahun 2026 terhadap target tahunan BPBAP Ujung Batee (99,5 %) adalah yang tertinggi (Tabel 5) jika dibandingkan dengan UPT air payau DJPB lainnya yaitu BPBAP Takalar (109,02 %), BPBAP Situbondo (66,84 %) dan BBPBAP Jepara (22,73 %).

Tabel 5. Perbandingan capaian sampel uji laboratorium antar UPT Air Payau

No	Satuan Kerja	Target 2026 (sampel)	Realisasi TW 1 (sampel)	Capaian (%)
1	BBPBAP Jepara	1.810	520	28,73
2	BPBAP Ujung Batee	200	199	603,03
3	BPBAP Situbondo	1.674	1.119	66,84
4	BPBAP Takalar	676	737	109,02

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja pengujian sampel Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan pada Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 56.000.000. Realisasi anggaran pada Triwulan I (Januari–Maret) mencapai Rp 31.249.300, atau sebesar 55,80% dari total alokasi anggaran tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan kegiatan telah dapat dipenuhi pada triwulan pertama, sementara sisa anggaran akan digunakan untuk mendukung kegiatan pengujian pada triwulan berikutnya.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Seluruh target indikator pada periode sebelumnya telah tercapai tanpa kendala. Tindak lanjut yang dilakukan adalah mempertahankan konsistensi pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan air payau guna menjamin mutu pelayanan laboratorium Satker BPBAP Ujung Batee.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026, tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target realisasi kegiatan pengujian sampel Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Seluruh kegiatan telah berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program, kesiapan sumber daya laboratorium, serta efektivitas koordinasi tim dalam mendukung keberhasilan kegiatan.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melanjutkan proses pelayanan pengujian sampel sebagai bagian dari pencapaian target indikator kinerja sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan komprehensif mengenai kejadian penyakit pada sistem budidaya perikanan.

IK-2: Calon induk unggul udang yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja ini mengukur jumlah calon induk unggul ikan udang yang disalurkan oleh BPBAP Ujung Batee kepada unit pembenihan di masyarakat. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan ikan udang milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan. Spesifikasi calon induk ikan udang secara umum harus memenuhi persyaratan sehat, mempunyai deskripsi yang jelas, yaitu jenis dan varietas induk ikan udang unggul, bentuk tubuh normal dan tidak cacat yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap, dan ukuran calon induk ikan udang berat 25 gram.

Tabel 6. Capaian Indikator: Calon induk unggul udang yang disalurkan ke masyarakat

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026 (ekor)	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	2,136	0.00

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi capaian persentase penyaluran bantuan calon induk unggul udang kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pada periode tersebut tidak terdapat target capaian, serta kegiatan masih menunggu kedatangan benih yang akan diproduksi menjadi calon induk sesuai standar bantuan yang dipersyaratkan. Selain itu, indikator kinerja penyaluran calon induk unggul udang pada Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025, karena pada periode tersebut juga belum ditetapkan target maupun realisasi capaian.

Tabel 7. Perbandingan capaian bantuan calon induk udang antar UPT air payau

No	Satuan Kerja	Target 2026 (ekor)	Realisasi TW 1 (ekor)	Capaian 2026 (%)
1	BBPBAP Jepara	-	-	-
2	BPBAP Ujung Batee	2.136	-	-
3	BPBAP Situbondo	-	-	-
4	BPBAP Takalar	6.437	-	-

Pada Triwulan I tahun 2026, realisasi capaian penyaluran calon induk unggul udang belum dapat dibandingkan antar UPT air payau. Hal ini disebabkan karena hanya BPBAP Ujung Batee dan BPBAP Takalar yang memiliki target penyaluran pada tahun 2026, namun keduanya belum merealisasikan capaian karena kegiatan masih dalam tahap produksi untuk memperoleh ukuran standar calon induk udang yang dipersyaratkan sebelum disalurkan ke masyarakat. Adapun BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo tidak memiliki target pada indikator ini, sehingga tidak terdapat capaian yang dapat dibandingkan.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran bantuan calon induk yang dialokasikan pada tahun 2026 sebesar Rp 99.937.000 dengan realisasi pada Triwulan I mencapai Rp 34.256.000 atau 34,28%. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan produksi calon induk sesuai standar yang dipersyaratkan, sehingga pada periode ini belum dilakukan penyaluran kepada masyarakat.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Melakukan cut off sebagai upaya penyesuaian jumlah pakan yang tersedia dengan jumlah calon kakap putih yang dipelihara. Kemudian melakukan pengkayaan pakan agar calon ikan kakap tumbuh secara maksimal dengan pemberian jumlah pakan yang cukup berdasarkan Biomassa, pergantian air secara rutin dan kontrol kualitas berkala.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Calon induk udang yang diproduksi saat ini masih belum tersedia (0 ekor), karena proses pemeliharaan masih menunggu kedatangan benih yang akan dijadikan calon induk udang yang akan dikirim dari BPIU2K Karangasem.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Akan melakukan proses pemeliharaan benih yang akan dijadikan calon induk setelah kedatangan benih dari BPIU2K Karangasem.

IK-3: Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja ini mengukur jumlah ekor benih ikan air payau yang disalurkan sebagai bantuan oleh BPBAP Ujung Batee kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang dinilai berkomitmen dalam usaha pembudidayaan ikan dan mampu mengelola produksi pembesaran budi daya ikan air payau sesuai dengan kaidah-kaidah cara budi daya ikan yang baik. Kriteria benih ikan air payau yang akan disalurkan harus memenuhi persyaratan sehat, bertubuh normal atau tidak cacat, dan ukuran benih ikan Bandeng telah mencapai ukuran 1 cm, benih ikan Nila Salin telah mencapai ukuran 2 cm.

Tabel 8. Capaian Indikator: Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026 (ekor)	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
10.000	11.000	110	0	0	0	0	1.207.320	0.00

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Pada Triwulan I Tahun 2026 tidak terdapat target maupun realisasi capaian penyaluran benih ikan air payau kepada masyarakat. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Triwulan I Tahun 2025, di mana target penyaluran ditetapkan sebanyak 10.000 ekor dengan realisasi mencapai 11.000 ekor atau 110% dari target. Dengan demikian, capaian indikator pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, karena pada tahun 2026 tidak terdapat target maupun realisasi capaian. Hal ini menunjukkan bahwa progres capaian kinerja penyaluran benih ikan air payau pada Tahun 2026 masih bergantung pada perkembangan kegiatan produksi dan distribusi benih pada triwulan berikutnya.

Tabel 9. Perbandingan capaian bantuan benih ikan payau antar UPT air payau

No	Satuan Kerja	Target 2026 (ekor)	Realisasi TW 1 (ekor)	Capaian 2026 (%)
1	BBPBAP Jepara	2.278.508	-	-
2	BPBAP Ujung Batee	1.207.320	-	-
3	BPBAP Situbondo	833.656	150.000	17,99
4	BPBAP Takalar	3.299.764	835.000	25,30

Pada Triwulan I tahun 2026, BBPBAP Jepara dan BPBAP Ujung Batee belum merealisasikan penyaluran benih ikan air payau sehingga capaian kinerja keduanya belum dapat dihitung. Sementara itu, BPBAP Situbondo telah menyalurkan sebanyak 150.000 ekor benih dari target tahunan 833.656 ekor, dengan capaian sebesar 17,99%. Di sisi lain, BPBAP Takalar menunjukkan kinerja paling tinggi dengan realisasi 835.000 ekor dari target 3.299.764 ekor, atau setara dengan capaian 25,30%. Secara keseluruhan, capaian Triwulan I masih relatif rendah karena sebagian besar satuan kerja masih dalam tahap persiapan produksi.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran bantuan benih ikan air payau yang dialokasikan pada tahun 2026 sebesar Rp 222.198.000 dengan realisasi pada Triwulan I mencapai Rp 55.934.442 atau 25,17 %. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan produksi benih ikan air payau sesuai standar yang dipersyaratkan, sehingga pada periode ini belum dilakukan penyaluran kepada masyarakat. Komoditas benih ikan air payau yang direncanakan untuk disalurkan pada tahun ini meliputi benih ikan Bandeng dan benih ikan Nila.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan pengkayaan pakan induk bandeng dan pembersihan atap ruangan pembenihan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Benih ikan nila salin saat ini telah tersedia dan siap digunakan. Namun, untuk ikan bandeng, benih belum tersedia karena hingga kini belum ada proposal yang masuk. Selain itu, induk ikan bandeng juga belum memasuki tahap pemijahan, sehingga ketersediaan benih masih menunggu proses lebih lanjut.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketersediaan benih serta dorongan untuk mengajukan proposal bantuan. Khusus untuk ikan bandeng, saat ini sedang dilakukan perlakuan khusus dan manipulasi lingkungan dengan tujuan mempercepat proses pemijahan induk. Namun demikian, hingga periode pelaporan ini belum terdapat perkembangan signifikan, sehingga diperkirakan masih diperlukan waktu beberapa bulan sebelum benih dapat tersedia untuk mendukung pelaksanaan program bantuan.

IK-4: Benih ikan udang yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja ini mengukur jumlah ekor benih ikan udang yang disalurkan sebagai bantuan oleh BPBAP Ujung Batee kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang dinilai berkomitmen dalam usaha pembudidayaan ikan udang dan mampu mengelola produksi pembesaran budi daya ikan udang sesuai dengan kaidah-kaidah cara budi daya ikan udang yang baik. Kriteria benih ikan udang yang akan disalurkan harus memenuhi persyaratan sehat, bertubuh normal atau tidak cacat, dan ukuran benih udang Windu telah mencapai ukuran PL10, serta benih udang Vaname telah mencapai ukuran PL8.

Tabel 10. Capaian Indikator: Benih ikan udang yang disalurkan ke masyarakat

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026 (ekor)	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	2.800.000	2.799.080	99,97	0	11.472.302	24,40

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Realisasi bantuan benih udang yang disalurkan kepada masyarakat pada Triwulan I tahun 2026 mencapai 99,97% dari target triwulan sebesar 2.800.000 ekor benih. Jika dibandingkan dengan target tahunan, capaian penyaluran tersebut setara dengan 24,40%. Namun demikian, capaian Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 karena pada Triwulan I tahun tersebut tidak terdapat target maupun realisasi capaian.

Tabel 11. Perbandingan capaian bantuan benih ikan udang antar UPT air payau

No	Satuan Kerja	Target 2026 (ekor)	Realisasi TW1 (ekor)	Capaian 2026 (%)
1	BBPBAP Jepara	17.593.528	-	-
2	BPBAP Ujung Batee	11.472.302	2.799.080	24,40
3	BPBAP Situbondo	18.419.208	5.400.000	29,31
4	BPBAP Takalar	29.988.057	9.600.000	32,01

Perbandingan capaian penyaluran benih udang kepada masyarakat antar UPT air payau pada Triwulan I tahun 2026 menunjukkan bahwa BPBAP Takalar (32,01%) memiliki capaian tertinggi dibandingkan dengan BPBAP Ujung Batee (24,40%) dan BPBAP Situbondo (29,31%). Sementara itu, BBPBAP Jepara tidak memiliki capaian pada periode ini sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran bantuan benih udang yang dialokasikan pada tahun 2026 sebesar Rp 490.798.000 dengan realisasi hingga Triwulan I mencapai Rp 171.895.791 atau 35,02 %. Jika dibandingkan dengan realisasi penyaluran benih udang, capaian output telah mencapai 24,40%, sehingga penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung proses produksi benih udang serta kegiatan penyaluran ke masyarakat.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan persiapan operasional yang matang sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan supaya kegiatan bisa berjalan maksimal.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Produksi belum dapat mencapai tingkat optimal karena keterbatasan jumlah nauplius yang dipesan, sehingga hanya dapat dimanfaatkan setelah mencapai tahap post larva.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Pemesanan nauplius akan dilakukan lebih awal sebagai bagian dari proses pemeliharaan pembenihan udang vaname. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan benih sesuai dengan kebutuhan serta mendukung keselarasan dalam perencanaan kegiatan pembenihan yang telah ditetapkan.

IK-5: Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji oleh BPBAP Ujung Batee

Monitoring penyakit ikan merupakan salah satu kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh BPBAP Ujung Batee dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha budidaya perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai kejadian penyakit pada komoditas budidaya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan teknis maupun kebijakan pengendalian penyakit. Data hasil monitoring diharapkan memberikan gambaran status kesehatan ikan budidaya di wilayah kerja BPBAP Ujung Batee, sekaligus menjadi acuan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit pada sistem budidaya perikanan. Capaian ini mencerminkan efektivitas layanan laboratorium dalam mendukung pengendalian penyakit serta peningkatan produktivitas budidaya perikanan di wilayah kerja BPBAP Ujung Batee.

Tabel 12. Capaian Indikator: Sampel monitoring penyakit ikan

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026 (ekor)	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	12	12	100	0	60	20

*Tahun 2025, indikator tidak diakomodir

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator kinerja sampel monitoring penyakit ikan merupakan indikator baru yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026. Target jumlah sampel monitoring penyakit ikan pada tahun 2026 adalah sebanyak 60 sampel, dengan target Triwulan I sebesar 12 sampel. Realisasi capaian pada Triwulan I menunjukkan hasil 100%, yaitu sebanyak 12 sampel dari target triwulan. Jika dibandingkan dengan target tahunan, capaian tersebut telah mencapai 20% dari total target tahunan.

Tabel 13. Perbandingan capaian sampel monitoring penyakit ikan antar UPT air payau

No	Satuan Kerja	Target 2026 (sampel)	Realisasi TW1 (sampel)	Capaian 2026 (%)
1	BBPBAP Jepara	-	-	-
2	BPBAP Ujung Batee	60	12	20
3	BPBAP Situbondo	-	-	-
4	BPBAP Takalar	60	17	28,33

Indikator kinerja sampel monitoring penyakit ikan pada Triwulan I tahun 2026 hanya dimiliki oleh dua UPT air payau, yaitu BPBAP Ujung Batee dan BPBAP Takalar. Dari kedua UPT tersebut, capaian tertinggi dicatat oleh BPBAP Takalar sebesar 28,33% terhadap target tahunan, sedangkan capaian BPBAP Ujung Batee mencapai 20%.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja pengujian sampel monitoring penyakit ikan pada Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 57.576.000, yang diperuntukkan bagi belanja bahan serta biaya perjalanan pengambilan sampel ke beberapa lokasi target. Pada Triwulan I, belum terdapat realisasi anggaran untuk kegiatan ini. Penggunaan bahan uji masih

memanfaatkan sisa anggaran tahun sebelumnya, sedangkan perjalanan pengambilan sampel dilakukan dengan dukungan anggaran dari kegiatan lain karena lokasi sampling pada periode ini masih dapat dijangkau dari balai (perjalanan lokal).

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026, tidak terdapat tindak lanjut terhadap permasalahan periode sebelumnya karena indikator kinerja monitoring penyakit ikan belum tercantum dalam perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan merupakan bagian dari implementasi awal indikator kinerja monitoring penyakit ikan sesuai perencanaan Tahun Anggaran 2026.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026, kegiatan monitoring penyakit ikan telah terlaksana sesuai rencana tanpa adanya kendala. Seluruh tahapan kegiatan berjalan lancar dan mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program serta kesiapan laboratorium dalam mendukung keberlanjutan budidaya perikanan.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melanjutkan proses sampling dan pengujian sampel sebagai bagian dari pencapaian target indikator kinerja monitoring penyakit ikan. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan komprehensif mengenai kejadian penyakit pada sistem budidaya perikanan. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam evaluasi kesehatan ikan serta pengendalian penyakit guna mendukung keberlanjutan usaha budidaya.

IK-6: Sampel surveilan resistensi antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau yang diuji oleh BPBAP Ujung Batee

Manajemen penggunaan antibiotik pada budidaya ikan yang tidak tepat dan tidak terkontrol berpotensi mendorong munculnya strain bakteri resisten. Selain itu, residu antibiotik pada ikan maupun lingkungan perairan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia serta mengganggu keseimbangan ekosistem sekitar. Resistensi antimikroba, termasuk resistensi terhadap antibiotik, telah menjadi isu global yang memicu gerakan bersama dalam upaya penanggulangannya. Pengendalian resistensi antimikroba pada ikan budidaya merupakan langkah strategis untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usaha perikanan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah pelaksanaan kegiatan surveilan resistensi antimikroba (AMU/AMR), yang bertujuan memperoleh data dan mengetahui tingkat resistensi bakteri terhadap antibiotik tertentu pada sistem budidaya, baik dari komoditas maupun media air.

Tabel 14. Capaian Indikator: Sampel surveilan resistensi antimikroba

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026 (ekor)	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
3	7	233,33	5	12	240	171,43	25	48

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Kepdirjen-PB) Nomor 77 Tahun 2026 tentang Rencana Surveilans Resistensi Antimikroba Tahun 2026, Satker BPBAP Ujung Batee memperoleh target tahunan sebanyak 25 sampel. Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi capaian surveilans resistensi antimikroba mencapai 240% dari target triwulanan, yaitu 12 sampel dari target 5 sampel. Jika dibandingkan dengan target tahunan, capaian tersebut setara dengan 48% dari total target tahunan. Dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2025, capaian Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan peningkatan realisasi sebesar 171,43%.

Tabel 15. Perbandingan capaian sampel antimikrobal resisten antar UPT air payau

No	Satuan Kerja	Target 2026 (sampel)	Realisasi TW1 (sampel)	Capaian 2026 (%)
1	BBPBAP Jepara	78	-	-
2	BPBAP Ujung Batee	25	12	48
3	BPBAP Situbondo	73	48	65,75
4	BPBAP Takalar	61	14	22,95

Hasil perbandingan capaian surveilans resistensi antimikroba antar UPT Air Payau DJPB menunjukkan bahwa BPBAP Situbondo memiliki capaian tertinggi, yaitu sebesar 65,75% dari target tahunan. Sebaliknya, BPBAP Takalar mencatat capaian terendah dengan persentase hanya 22,95% dari target tahunan. Sementara itu, capaian BBPBAP Jepara tidak dapat dibandingkan pada Triwulan I Tahun 2026 karena perhitungan capaian dilakukan secara semesteran, bukan triwulanan.

Jenis sampel yang menjadi target kegiatan surveilans AMR Tahun 2026 oleh Laboratorium BPBAP Ujung Batee adalah komoditas udang. Dari total jumlah sampel hasil surveilans pada Triwulan I Tahun 2026, sebagian besar merupakan udang vannamei yang diperoleh dari sistem budidaya pembesaran di tambak plastik dan tambak tanah. Pada periode tersebut, telah dikumpulkan sebanyak 12 sampel. Dari hasil pengujian, ditemukan 2 isolat *Vibrio parahaemolyticus*. Persentase resistensi kedua isolat terhadap antibiotik menunjukkan bahwa isolat bakteri tersebut masih sensitif (100%) terhadap Oxytetracycline, Tetracycline, dan Enrofloxacin.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja pengujian sampel antimikroba resisten pada Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 11.122.000, yang dialokasikan untuk belanja bahan serta biaya perjalanan pengambilan sampel di beberapa lokasi target. Realisasi anggaran pada Triwulan I (Januari–Maret) mencapai Rp 3.687.480 atau sebesar 33,15% dari total alokasi.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Tindak lanjut kegiatan telah dilaksanakan melalui pengambilan dan pengujian sampel antimikroba resisten sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja surveilans AMU/AMR serta memastikan tersedianya data yang valid untuk mendukung keberlanjutan program budidaya perikanan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026, tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target realisasi kegiatan surveilan antimikroba resisten. Seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melanjutkan proses sampling dan pengujian sampel sebagai bagian dari pencapaian target indikator kinerja surveilan antimikroba resisten. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan tersedianya data yang akurat mengenai tingkat resistensi bakteri terhadap antibiotik pada sistem budidaya perikanan.

IK-7: Calon induk unggul ikan air payau yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul ikan air payau, khususnya ikan bandeng, yang dihasilkan oleh BPBAP Ujung Batee. Secara umum, spesifikasi calon induk ikan harus memenuhi persyaratan sehat, memiliki deskripsi yang jelas (jenis dan varietas induk unggul), serta menunjukkan bentuk tubuh normal tanpa cacat dengan anggota tubuh lengkap. Selain itu, ukuran calon induk ikan bandeng yang diproduksi telah mencapai berat minimal 300 gram. Pemenuhan standar spesifikasi calon induk bandeng tersebut menunjukkan bahwa proses produksi di BPBAP Ujung Batee telah berjalan sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan. Hal ini penting karena kualitas calon induk akan menentukan keberhasilan program pembenihan dan budidaya berkelanjutan.

Tabel 16. Capaian Indikator: Calon induk unggul ikan air payau yang diproduksi

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026 (ekor)	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	866	0.00

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Pada Triwulan I Tahun 2026, BPBAP Ujung Batee belum merealisasikan capaian produksi calon induk unggul ikan air payau. Hal ini disebabkan karena kegiatan pada periode tersebut masih berada dalam tahap persiapan awal untuk produksi calon induk sesuai standar yang dipersyaratkan, sehingga hasil akhir belum dapat dilaporkan sebagai capaian kinerja. Selain itu, capaian indikator produksi calon induk unggul ikan air payau pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2025, karena pada periode tersebut juga belum terdapat target maupun realisasi capaian. Meskipun belum terdapat capaian pada Triwulan I, kegiatan yang dilakukan tetap memiliki nilai strategis sebagai investasi proses produksi yang akan berkontribusi pada pencapaian target di triwulan berikutnya. Konsistensi dalam menjaga standar produksi di tahap awal akan menjadi faktor penentu keberhasilan capaian tahunan serta mendukung keberlanjutan program pembenihan ikan air payau.

Tabel 17. Perbandingan capaian produksi calon induk ikan air payau

No	Satuan Kerja	Target 2026 (ekor)	Realisasi TW 1 (ekor)	Capaian 2026 (%)
1	BBPBAP Jepara	2.510	-	-
2	BPBAP Ujung Batee	866	-	-
3	BPBAP Situbondo	-	-	-
4	BPBAP Takalar	666	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi capaian produksi calon induk unggul ikan air payau belum dapat dibandingkan antar seluruh UPT Air Payau DJPB. Hal ini disebabkan karena kegiatan masih berada dalam tahap proses produksi calon induk ikan air payau yang membutuhkan waktu relatif panjang untuk mencapai standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, BPBAP Situbondo tidak memiliki target indikator kinerja produksi calon induk ikan air payau, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam perbandingan capaian antar UPT.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran produksi calon induk ikan air payau yang dialokasikan pada Tahun 2026 sebesar Rp 61.831.000. Pada Triwulan I, realisasi anggaran mencapai Rp 9.620.000 atau 15,56% dari total alokasi. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan produksi calon induk unggul ikan air payau sesuai dengan standar teknis yang dipersyaratkan. Realisasi anggaran pada Triwulan I menunjukkan bahwa penggunaan dana masih relatif rendah dibandingkan total alokasi tahunan. Hal ini sejalan dengan kondisi kegiatan yang masih berada dalam tahap proses produksi calon induk, sehingga kebutuhan anggaran belum optimal.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah ditindaklanjuti permasalahan pencapaian indikator kinerja pada periode sebelumnya.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Benih untuk budidaya calon induk saat ini belum tersedia, karena masih dalam tahap persiapan wadah budidaya. Proses pembenihan maupun pemesanan benih sedang berlangsung, sehingga kegiatan budidaya akan dilaksanakan setelah seluruh kebutuhan dasar tersedia secara lengkap.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Upaya percepatan sedang dilakukan dalam proses persiapan wadah budidaya serta pembenihan maupun pemesanan benih, guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan budidaya pada tahap berikutnya.

IK-8: Calon induk unggul udang yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee

Produksi calon induk unggul udang di UPT Air Payau merupakan kegiatan strategis yang bertujuan menjamin ketersediaan induk berkualitas untuk mendukung keberlanjutan usaha pembenihan dan budidaya komoditas perikanan air payau. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target kinerja tahunan, tetapi juga menjadi fondasi utama keberlanjutan industri perikanan air payau. Dengan tersedianya induk udang berkualitas, rantai produksi mulai dari benih hingga budidaya dapat berjalan lebih efisien, produktif, dan berdaya saing, sehingga meningkatkan nilai tambah bagi pembudidaya dan memperkuat posisi komoditas udang di pasar domestik maupun ekspor. Hal ini

sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendorong kemandirian benih serta mendukung pencapaian target produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan. Spesifikasi calon induk udang secara umum harus memenuhi persyaratan sehat, mempunyai deskripsi yang jelas, yaitu jenis dan varietas induk udang unggul, bentuk tubuh normal dan tidak cacat yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap, dan ukuran calon induk udang telah mencapai berat 25 gram.

Tabel 18. Capaian Indikator: Calon induk unggul udang yang diproduksi

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026 (ekor)	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	20.515	0.00

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Pada Triwulan I Tahun 2026, BPBAP Ujung Batee belum merealisasikan capaian produksi calon induk unggul udang karena kegiatan masih berada dalam tahap proses produksi sesuai standar yang dipersyaratkan sehingga hasil akhir belum dapat dilaporkan sebagai capaian kinerja, dan capaian indikator produksi pada periode ini juga tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 karena saat itu belum terdapat target maupun realisasi; meskipun demikian, kegiatan yang dilakukan tetap memiliki nilai strategis sebagai investasi proses produksi yang akan berkontribusi pada pencapaian target di triwulan berikutnya, di mana konsistensi dalam menjaga standar produksi sejak tahap awal menjadi faktor penentu keberhasilan capaian tahunan serta mendukung keberlanjutan program pembenihan udang.

Tabel 19. Perbandingan capaian produksi calon induk udang antar UPT air payau

No	Satuan Kerja	Target 2026 (ekor)	Realisasi TW 1 (ekor)	Capaian 2026 (%)
1	BBPBAP Jepara	97.622	-	-
2	BPBAP Ujung Batee	20.515	-	-
3	BPBAP Situbondo	-	-	-
4	BPBAP Takalar	11.476	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi capaian calon induk udang di seluruh UPT air payau yang memiliki target (Jepara, Ujung Batee, dan Takalar). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi calon induk udang masih berada dalam tahap proses produksi awal, karena kegiatan masih berada dalam tahap proses produksi calon induk udang yang membutuhkan waktu relatif panjang untuk mencapai standar kualitas yang ditetapkan. BPBAP Situbondo tidak memiliki target indikator produksi calon induk udang, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian antar UPT.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran produksi calon induk unggul udang yang dialokasikan pada Tahun 2026 sebesar Rp 1.032.587.000. Pada Triwulan I, realisasi anggaran mencapai Rp 237.121.000 atau 22,96 % dari total alokasi yang menunjukkan tingkat penyerapan dana sangat tinggi di awal tahun. Dana tersebut digunakan untuk

mendukung kegiatan produksi calon induk unggul udang sesuai dengan standar teknis yang dipersyaratkan.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah ditindaklanjuti permasalahan pencapaian indikator kinerja pada periode sebelumnya.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Calon induk udang yang diproduksi saat ini masih belum tersedia (0 ekor), karena proses pemeliharaan masih menunggu kedatangan benih yang akan dijadikan calon induk udang yang akan dikirim dari BPIU2K Karangasem.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Akan melakukan proses pemeliharaan benih yang akan dijadikan calon induk setelah kedatangan benih dari BPIU2K Karangasem.

IK-9: Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja ini merupakan data dan informasi produksi pakan ikan mandiri yang dihasilkan guna menyediakan pakan yang berkualitas untuk operasional budidaya ikan yang diproduksi. Tujuannya dalam rangka mengoptimalkan unit produksi pakan ikan skala medium yang ada di UPT untuk memproduksi pakan ikan dan memaksimalkan penggunaan bahan baku yang tersedia. Volume bahan baku pakan ikan yang tersedia adalah volume pakan ikan yang akan diproduksi ditambahkan estimasi loss/penyusutan bahan baku pakan yang terjadi selama proses produksi dan penyusutan kadar air bahan baku setelah dikeringkan $\pm 20\%$.

Tabel 20. Capaian Indikator: Pakan ikan yang diproduksi

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026 (ekor)	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	3.448	0.00

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Pada Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat realisasi capaian produksi pakan mandiri karena tidak ada penetapan target pada periode tersebut, sehingga capaian indikator kinerja pakan mandiri belum dapat dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 yang juga tidak memiliki target maupun realisasi. Perbandingan capaian produksi pakan ikan antar UPT air payau menunjukkan bahwa BPBAP Takalar menjadi satu-satunya UPT dengan realisasi sebesar 340 kg atau 1,67% dari target tahunan 10.193 kg, sementara BPBAP Jepara dengan target 85.564 kg dan BPBAP Ujung Batee dengan target 3.448 kg belum merealisasikan capaian produksi, serta BPBAP Situbondo tidak memiliki indikator kinerja produksi pakan ikan sehingga tidak dapat dimasukkan dalam perbandingan capaian.

Tabel 21. Perbandingan capaian produksi pakan ikan antar UPT air payau

No	Satuan Kerja	Target 2026 (kg)	Realisasi TW 1 (kg)	Capaian 2026 (%)
1	BBPBAP Jepara	85.564	-	-
2	BPBAP Ujung Batee	3.448	-	-
3	BPBAP Situbondo	-	-	-
4	BPBAP Takalar	10.193	340	1,67

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Kegiatan produksi pakan ikan pada Tahun 2026 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000 dengan realisasi pada Triwulan I sebesar Rp 4.085.000 atau 8,17 % dari total alokasi anggaran yang menunjukkan tingkat penyerapan dana masih rendah karena penggunaan anggaran lebih difokuskan pada kebutuhan penunjang produksi seperti pengadaan bahan baku dan pemeliharaan sarana, sehingga capaian ini dapat dikategorikan sebagai tahap persiapan awal yang memberi ruang bagi percepatan realisasi pada triwulan berikutnya agar efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tetap terjaga serta mendukung pencapaian target produksi pakan ikan secara optimal.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Tidak terdapat permasalahan produksi pakan mandiri pada periode sebelumnya sehingga tidak ada tindak lanjut terhadap permasalahan sebelumnya. Selain itu status blokir anggaran produksi pakan mandiri sehingga tidak terdapat kegiatan produksi pakan mandiri.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Pada TW I tidak memiliki target produksi yang ditetapkan, serta terdapat kendala operasional pada mesin produksi pakan yang memengaruhi kelancaran proses kerja.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Pada TW II direncanakan akan dilakukan perbaikan terhadap mesin produksi pakan, serta memulai kembali kegiatan produksi secara bertahap setelah proses perbaikan selesai dilaksanakan.

IK-10: Benih ikan air payau yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee

Produksi benih ikan air payau di UPT merupakan kegiatan strategis untuk menjamin ketersediaan benih berkualitas dalam mendukung keberlanjutan usaha pembenihan dan budidaya komoditas perikanan air payau. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja tahunan, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi penguatan industri perikanan air payau. Dengan tersedianya benih unggul, rantai produksi dari pembenihan hingga budidaya dapat berjalan lebih efisien, produktif, dan berdaya saing, sehingga memberikan nilai tambah bagi pembudidaya serta memperkuat posisi komoditas perikanan air payau di pasar domestik maupun ekspor. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendorong kemandirian benih dan mendukung pencapaian target produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Tabel 22. Capaian Indikator: Benih ikan air payau yang diproduksi

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026 (ekor)	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	300.000	0.00

* Tahun 2025, indikator tidak diakomodir

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator kinerja produksi benih ikan air payau merupakan indikator baru yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026. Target jumlah produksi benih ikan air payau pada tahun 2026 adalah sebanyak 300.000 ekor. Belum terdapat realisasi capaian produksi benih ikan air payau karena tidak ada penetapan target pada periode tersebut, sehingga capaian indikator kinerja benih ikan air payau belum dapat dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 yang juga tidak memiliki target maupun realisasi.

Tabel 23. Perbandingan capaian produksi benih ikan payau antar UPT air payau

No	Satuan Kerja	Target 2026 (ekor)	Realisasi TW 1 (ekor)	Capaian 2026 (%)
1	BBPBAP Jepara	3.607.538	9.000	0,25
2	BPBAP Ujung Batee	300.000	-	-
3	BPBAP Situbondo	1.333.333	-	-
4	BPBAP Takalar	1.321.342	147.000	11,13

Pada triwulan I tahun 2026, capaian produksi benih ikan air payau antar UPT masih rendah secara umum. BBPBAP Jepara dengan target 3.607.538 ekor baru menghasilkan 9.000 ekor atau 0,25%. BPBAP Ujung Batee dan BPBAP Situbondo belum mencatatkan realisasi sehingga capaian masih 0%. Sementara itu, BPBAP Takalar menunjukkan hasil paling baik dengan realisasi 147.000 ekor dari target 1.321.342 ekor atau 11,13%. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa hanya BPBAP Takalar yang sudah menunjukkan progres nyata, sedangkan UPT lain perlu meningkatkan upaya agar target tahunan dapat tercapai.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran produksi benih ikan air payau yang dialokasikan pada Tahun 2026 sebesar Rp 47.250.000. Pada Triwulan I, realisasi anggaran mencapai Rp 21.514.000 atau 45,53% dari total alokasi. Tingkat penyerapan dana ini tergolong tinggi di awal tahun dan digunakan untuk mendukung kegiatan produksi benih ikan air payau sesuai standar teknis yang ditetapkan

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara terencana dan berkelanjutan, serta menginisiasi berbagai inovasi dan terobosan guna mempercepat proses pemijahan induk. Upaya tersebut didukung melalui penerapan manipulasi lingkungan yang terkontrol dan peningkatan kualitas serta kuantitas nutrisi pakan, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan keberhasilan reproduksi dan produktivitas secara keseluruhan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Induk ikan bandeng belum memasuki tahap pemijahan, sehingga ketersediaan benih masih menunggu proses lebih lanjut.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melakukan percepatan produksi benih ikan air payau agar target tahunan tidak tertinggal. Memastikan kesiapan sarana dan prasarana produksi, memperkuat koordinasi internal untuk mengatasi hambatan teknis. Monitoring berkala dan evaluasi progres agar setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

IK-9: Benih udang yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee

Produksi benih ikan air payau di UPT merupakan kegiatan strategis untuk menjamin ketersediaan benih berkualitas dalam mendukung keberlanjutan usaha pembenihan dan budidaya komoditas perikanan air payau. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja tahunan, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi penguatan industri perikanan air payau. Dengan tersedianya benih unggul, rantai produksi dari pembenihan hingga budidaya dapat berjalan lebih efisien, produktif, dan berdaya saing, sehingga memberikan nilai tambah bagi pembudidaya serta memperkuat posisi komoditas perikanan air payau di pasar domestik maupun ekspor. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendorong kemandirian benih dan mendukung pencapaian target produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Tabel 24. Capaian Indikator: Benih udang yang diproduksi

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026 (ekor)	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	800.000	967.000	120,88	0	4.500.000	21,49

* Tahun 2025, indikator tidak diakomodir

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator kinerja produksi benih ikan air payau merupakan indikator baru yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026. Target jumlah produksi benih ikan air payau pada tahun 2026 adalah sebanyak 300.000 ekor. Belum terdapat realisasi capaian produksi benih ikan air payau karena tidak ada penetapan target pada periode tersebut, sehingga capaian indikator kinerja benih ikan air payau belum dapat dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 yang juga tidak memiliki target target maupun realisasi.

Tabel 25. Perbandingan capaian produksi benih udang antar UPT air payau

No	Satuan Kerja	Target 2026 (ekor)	Realisasi TW 1 (ekor)	Capaian 2026 (%)
1	BBPBAP Jepara	24.750.560	1.025.000	4,14
2	BPBAP Ujung Batee	4.500.000	967.000	21,49
3	BPBAP Situbondo	13.200.000	1.750.000	13,25
4	BPBAP Takalar	8.000.000	-	-

Perbandingan realisasi capaian produksi benih udang antar UPT air payau pada triwulan I tahun 2026 terhadap target tahunan menunjukkan bahwa BPBAP Ujung Batee mencatat capaian tertinggi sebesar 21,49%, diikuti oleh BPBAP Situbondo dengan capaian 13,25%, serta BBPBAP Jepara yang masih rendah dengan capaian 4,14%. Sementara itu, BPBAP Takalar belum memiliki realisasi pada periode ini. Hasil ini menggambarkan adanya perbedaan kinerja antar balai, di mana Ujung Batee menunjukkan progres paling signifikan,

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran produksi benih udang yang dialokasikan pada Tahun 2026 sebesar Rp 187.351.000. Pada Triwulan I, realisasi anggaran mencapai Rp 30.961.780 atau 16,53 % dari total alokasi. Tingkat penyerapan dana ini tergolong cukup tinggi di awal tahun dan telah digunakan untuk mendukung kegiatan produksi benih udang sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Indikator ini merupakan indikator baru dalam perencanaan dan evaluasi kinerja sehingga belum tersedia data historis maupun pengalaman implementasi sebagai dasar pembandingan; oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi berkala tetap dilakukan untuk mengantisipasi hambatan serta memastikan pencapaian target

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama Triwulan I Tahun 2026, tidak ditemukan permasalahan yang signifikan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja, sehingga target indikator kinerja dapat dicapai tanpa hambatan berarti.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Peningkatan koordinasi antar pihak terkait, pelaksanaan monitoring secara berkesinambungan, serta optimalisasi terhadap permintaan benih udang dari para pembudidaya. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan budidaya dan memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

2. SK-2: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut

IK-12: Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee

Benih ikan air laut adalah ikan yang hidup di perairan laut dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva yang akan digunakan untuk kegiatan pembudidayaan ikan. Benih yang disalurkan ke masyarakat sebagai bantuan benih ikan kepada masyarakat pembudidaya. Indikator kinerja ini mengukur jumlah ekor benih ikan air payau yang disalurkan sebagai bantuan oleh BPBAP Ujung Batee kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang dinilai berkomitmen dalam usaha pembudidayaan ikan dan mampu mengelola produksi pembesaran budi daya ikan air

payau sesuai dengan kaidah-kaidah cara budi daya ikan yang baik. Kriteria benih ikan air payau yang akan disalurkan harus memenuhi persyaratan sehat, bertubuh normal atau tidak cacat, dan ukuran benih ikan Kakap Putih telah mencapai ukuran 2,5 cm.

Tabel 26. Capaian Indikator: Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026 (ekor)	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
20.000	96.000	480.000	0	0	0	0	217.388	0

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Berdasarkan data Triwulan I tahun 2025 dan 2026, indikator capaian produksi benih ikan laut menunjukkan adanya penurunan yang signifikan. Pada tahun 2025, target produksi sebesar 20.000 ekor terealisasi hingga 96.000 ekor atau 480% dari target, yang berarti output melampaui target tahunan secara luar biasa. Namun, pada tahun 2026 tidak terdapat realisasi produksi pada triwulan pertama, sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 217.388 ekor masih 0%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya percepatan produksi dan distribusi benih ikan laut agar target tahunan dapat tercapai, dengan menjadikan capaian tahun 2025 sebagai acuan strategi untuk memperbaiki kinerja di tahun berjalan. Jika dibandingkan dengan UPT Air Payau DJPB lainnya, capaian pada tahun 2026 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 27. Perbandingan capaian benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat

No	Satuan Kerja	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
1	BBPBAP Jepara	-	-	-
2	BPBAP Ujung Batee	217.388	-	-
3	BPBAP Situbondo	-	-	-
4	BPBAP Takalar	49.918	-	-

Berdasarkan data capaian produksi benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2026, terlihat bahwa dari empat satuan kerja yang tercatat, hanya BPBAP Ujung Batee dengan target 217.388 ekor dan BPBAP Takalar dengan target 49.918 ekor yang memiliki alokasi target, namun keduanya belum merealisasikan penyaluran benih pada triwulan pertama. Sementara itu, BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo tidak memiliki target maupun realisasi pada periode ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian terhadap target tahunan masih 0% pada seluruh satuan kerja, sehingga diperlukan percepatan produksi dan distribusi benih ikan laut di triwulan berikutnya agar target tahunan dapat tercapai sesuai rencana.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Pada Tahun 2026, anggaran produksi benih ikan air laut dialokasikan sebesar Rp 912.276.000 dengan realisasi mencapai Rp 297.379.042 atau 32,60 %. Tingkat penyerapan dana ini tergolong cukup tinggi di awal tahun dan telah digunakan untuk mendukung kegiatan penyaluran benih ikan laut udang sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Komoditas benih ikan air laut yang disalurkan kepada masyarakat pada tahun tersebut hanya berupa benih ikan kakap putih.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Membuat perencanaan awal lebih baik dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi produksi sehingga diharapkan kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Melakukan peningkatan padat tebar sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Indukan belum menghasilkan telur. Hal ini disebabkan oleh komposisi populasi indukan yang didominasi oleh betina, sehingga tidak terdapat atau sangat minim keberadaan pejantan yang berperan dalam proses pembuahan. Dalam kondisi tersebut, meskipun sebagian besar indukan telah berjenis kelamin betina dan berpotensi untuk bertelur, proses reproduksi tidak dapat berlangsung secara optimal tanpa adanya pejantan.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Upaya peningkatan kualitas indukan dilakukan melalui penambahan induk jantan guna memperbaiki rasio antara jantan dan betina sehingga proses perkawinan dan pembuahan dapat berlangsung lebih optimal. Selain itu, dilakukan afkir terhadap induk yang tidak produktif untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan serta memastikan populasi indukan terdiri dari individu-individu dengan potensi reproduksi tinggi. Langkah ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan program pembenihan dan menjamin keberlanjutan produksi benih ikan air payau.

3. SK-3: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar

IK-13: Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBAP Ujung Batee

Indikator penyediaan peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 merupakan indikator baru yang mencakup kegiatan pengadaan peralatan, pemeliharaan (kalibrasi) alat, serta pemeliharaan status akreditasi. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium ditujukan untuk menunjang kegiatan pengujian sampel, sedangkan pemeliharaan status akreditasi dilakukan melalui kewajiban pembayaran iuran tahunan kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) serta pelaksanaan surveilan 1 setelah reakreditasi pada tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh proses pengujian yang dilakukan tetap sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan.

Tabel 28. Capaian Indikator: Peralatan laboratorium pengujian yang disediakan

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	1	0

* Tahun 2025, indikator tidak diakomodir

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Penghitungan capaian indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga pada Triwulan I belum terdapat realisasi, namun

kegiatan pendukung tetap dilaksanakan untuk memenuhi target tahunan. Fokus pengadaan diarahkan pada penyediaan peralatan pengujian kualitas air dan penyedia daya cadangan (UPS) guna menjamin kontinuitas proses pengujian sampel saat terjadi gangguan listrik. Hingga akhir Maret 2026, realisasi fisik telah mencapai 80%, dengan 4 dari 5 item peralatan tersedia dan siap dioperasikan. Selain itu, kewajiban administrasi berupa pembayaran iuran tahunan kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah diselesaikan sebagai bentuk komitmen menjaga standar mutu ISO/IEC 17025.

Tabel 29. Perbandingan capaian penyediaan peralatan laboratorium

No	Satuan Kerja	Target 2026 (unit)	Realisasi TW 1 (unit)	Capaian 2026 (%)
1	BBPBAP Jepara	-	-	-
2	BPBAP Ujung Batee	1	-	-
3	BPBAP Situbondo	-	-	-
4	BPBAP Takalar	1	-	-

Perbandingan capaian realisasi indikator pengadaan peralatan laboratorium pada UPT air payau menunjukkan bahwa hanya BPBAP Ujung Batee dan BPBAP Takalar yang memiliki indikator kinerja tersebut. Namun, pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena perhitungan indikator dilakukan secara tahunan. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator pengadaan peralatan laboratorium baru dapat dievaluasi pada akhir tahun sesuai dengan mekanisme pelaporan yang berlaku.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Total pagu anggaran untuk mendukung indikator ini adalah Rp77.748.000. Pada Triwulan I tahun 2026, realisasi keuangan mencapai Rp32.061.908 (41,24%). Penyerapan anggaran dinilai efektif dan selaras dengan progres fisik, mencakup belanja modal peralatan dan biaya pemeliharaan akreditasi.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Mengingat indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada Tahun Anggaran 2026, maka tidak terdapat permasalahan dari periode sebelumnya yang perlu ditindaklanjuti. Seluruh aktivitas pada periode ini merupakan implementasi awal dari perencanaan tahun berjalan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Satu item peralatan, yaitu UPS belum terealisasi. Kendala utama disebabkan oleh keterlambatan respon penawaran teknis dan kepastian stok dari pihak penyedia (supplier). Hal ini menjadi perhatian serius mengingat peran UPS sangat vital dalam memitigasi risiko kerusakan sirkuit alat uji akibat fluktuasi listrik.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Berdasarkan realisasi anggaran dan capaian fisik pada Triwulan I, rekomendasi untuk periode berikutnya difokuskan pada optimalisasi sisa pagu anggaran sebesar 58,76% untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium yang masih belum selesai, pemeliharaan rutin peralatan laboratorium dan pemeliharaan status akreditasi laboratorium. Disarankan agar Tim Pengadaan segera melakukan percepatan survei pasar dan penetapan penyedia alternatif untuk unit UPS pada awal Triwulan II

untuk mendapatkan penawaran yang kompetitif dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan.

4. SK-4: Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya

IK-14: Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee

Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan kepada kelompok masyarakat berupa sarana budidaya sistem bioflok, dan mesin pakan beserta bahan baku. Capaian indikator kinerja ini dengan cara mengukur target jumlah dari realisasi unit sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan oleh BPBAP Ujung Batee. Jumlah sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sesuai petunjuk teknis dan hasil verifikasi sesuai target jumlah unit sarana yang disalurkan.

Tabel 30. Capaian Indikator: Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (unit)	2021 (unit)	2022 (unit)	2023 (unit)	2024 (unit)	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)	
7	14	15	35	33	15	15	100	45.45

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Belum terdapat realisasi capaian sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat pada Triwulan I tahun 2026 karena belum dilakukan pengukuran mengingat tidak terdapat penetapan target pada triwulan I. Selain itu capaian indikator kinerja sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian yang sama pada Triwulan I tahun 2025. Kegiatan pada Triwulan I tahun 2026 ini masih dalam tahap identifikasi dan verifikasi kelompok calon penerima. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat capaian pada setiap UPT Air Payau DJPB untuk indikator ini.

Tabel 31. Perbandingan capaian penyaluran sarana budidaya antar UPT air payau

No	Satuan Kerja	Target 2026 (unit)	Realisasi TW 1 (unit)	Capaian 2026 (%)
1	BBPBAP Jepara	46	-	-
2	BPBAP Ujung Batee	23	-	-
3	BPBAP Situbondo	30	-	-
4	BPBAP Takalar	34	-	-

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran sarana produksi bioflok yang dialokasikan untuk masyarakat pada tahun 2026 sebesar Rp 5.125.440.000 dengan realisasi hingga akhir triwulan I mencapai Rp 3.828.000 atau 0,07 %. Anggaran tersebut mencakup belanja barang non-operasional, biaya identifikasi, verifikasi, monitoring calon

penerima, serta pengadaan sarana produksi bioflok. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dengan realisasi sarana produksi bioflok yang disalurkan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran masih sangat rendah karena kegiatan baru berada pada tahap awal. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan agar target penyaluran sarana produksi bioflok dapat tercapai sesuai rencana tahunan.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim bantuan pusat untuk mengidentifikasi serta memperoleh informasi mengenai tenaga ahli pada masing-masing dewan yang telah dialokasikan kepada UPT, termasuk pihak yang dapat dihubungi untuk keperluan teknis dan operasional.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Belum dilakukan penyusunan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) karena masih menunggu proposal dari kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) lainnya serta tenaga ahli dari dewan yang telah dialokasikan ke UPT. Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi dan penetapan CPCL belum dapat dilaksanakan pada Triwulan I, sehingga kegiatan akan dilanjutkan setelah seluruh persyaratan administrasi dan dukungan teknis tersedia.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Rekomendasi untuk periode berikutnya meliputi percepatan pengumpulan proposal dari Pokdakan dengan batas waktu yang jelas serta pendampingan agar dokumen segera selesai, koordinasi intensif dengan tenaga ahli yang dialokasikan ke UPT untuk memastikan dukungan teknis tersedia tepat waktu, penyusunan jadwal kerja terintegrasi agar proses administrasi dan teknis berjalan paralel, serta monitoring berkala terhadap progres penyusunan CPCL. Selain itu, perlu dilakukan asistensi teknis kepada Pokdakan yang belum mengajukan proposal agar kualitas dokumen sesuai standar dan dapat segera diverifikasi. Tindakan cepat juga dilakukan melalui komunikasi dengan tim bantuan pusat untuk memperoleh nomor kontak dan menjalin koordinasi dengan tenaga ahli.

5. SK-5: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di BPBAP Ujung Batee

IK-15: Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan merupakan pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPBAP Ujung Batee berdasarkan pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPBAP Ujung Batee yang menjadi objek pengawasan inspektorat jenderal. Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil dokumen tindak lanjut yang telah tuntas diselesaikan dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang dilakukan dalam satuan persen. Jika tidak

ada rekomendasi maka capaian atas indikator kinerja ini adalah sama dengan target sehingga persentase capaian atas target sebesar seratus persen.

Tabel 32. Capaian Indikator: Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
85	93	109,25	86	97	113,33	104,95	86	113,33

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Berdasarkan data capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2025, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada Triwulan I 2025, target ditetapkan sebesar 85 dengan realisasi mencapai 93 atau 109,25% dari target. Sementara itu, pada Triwulan I 2026 target meningkat menjadi 86 dengan realisasi sebesar 97, sehingga capaian mencapai 113,33%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan capaian sebesar 104,95%. Selain itu, capaian terhadap target tahunan juga menunjukkan hasil yang positif, yakni sebesar 113,33%. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pada Triwulan I 2026 tidak hanya berhasil melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 33. Perbandingan capaian Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan

No	Satuan Kerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW 1 (%)	Capaian 2026 (%)
1	BBPBAP Jepara	86	97,46	113,33
2	BPBAP Ujung Batee	86	97,46	113,33
3	BPBAP Situbondo	86	86	100
4	BPBAP Takalar	86	97,46	113,33

Perbandingan capaian penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada UPT Air Payau lingkup DJPB menunjukkan kinerja yang sangat positif. BPBAP Takalar, BPBAP Ujung Batee, dan BBPBAP Jepara masing-masing mencapai 113,33%, sementara BPBAP Situbondo mencatat capaian 100%. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa sebagian besar UPT telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan komitmen kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan serta menjaga konsistensi kinerja organisasi.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan I tahun 2026 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

IK-16: Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPBAP Ujung Batee. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Tabel 34. Capaian Indikator: Nilai penilaian mandiri SAKIP

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	84,20	0

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I tahun 2026 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2025 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini, karena hasil kinerja seluruh kegiatan akan mendukung aspek penilaian, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi aspek penilaian dan secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian indikator.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan capaian yaitu 1) Segera memenuhi dan melengkapi dokumen tindak lanjut rekomendasi dalam implementasi SAKIP; 2) Mempertahankan nilai implementasi SAKIP tetap optimal; 3) Monitoring dan evaluasi pemenuhan secara periodik dan melakukan koordinasi dengan tim pengelola kinerja.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Pemenuhan dokumen (data dukung) implementasi SAKIP telah dilaksanakan, namun data dukung seperti dokumen tindak lanjut rekomendasi belum di penuhi secara tepat waktu.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melakukan koordinasi dengan Tim SAKIP untuk : 1) Memenuhi dokumen SAKIP mulai dari Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, hingga tahap Evaluasi Akuntabilitas; 2) Monitoring dan evaluasi pemenuhan secara periodik dan melakukan koordinasi dengan tim pengelola kinerja.

IK-17: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPAP Ujung Batee

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui: (1) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (2) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (3) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP), penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja.

Tabel 35. Capaian Indikator: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	92,10	0

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I Tahun 2026 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2025 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan 1) Menyiapkan revisi POK dengan lebih cermat; 2) Monitoring dan evaluasi nilai IKPA agar realisasi sesuai ekspektasi.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Berdasarkan nilai per komponen pembentuk IKPA, bahwa komponen Belanja Kontraktual dan komponen Penyelesaian Tagihan masih nol sedangkan komponen lainnya mencapai nilai maksimal. Penyebabnya adalah sampai periode pelaporan belum ada melakukan kontrak pengadaan barang jasa sehingga menyebabkan tagihan SPM kontraktual belum ada. Jadi komponen tersebut tidak hitung dalam nilai IKPA.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. 1) Menyiapkan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II dengan lebih cermat; 2) Monitoring dan evaluasi nilai IKPA agar realisasi sesuai ekspektasi.

IK-18: Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu, yang berpedoman pada KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Variabel Efisiensi. Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:
 - a) Penggunaan SBK; dan/atau
 - b) Efisiensi SBK

Nilai kinerja perencanaan anggaran satker BPBAP Ujung Batee diperoleh dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) e-monev anggaran Kementerian Keuangan.

Tabel 36. Capaian Indikator: Nilai kinerja perencanaan anggaran

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	71,75	0

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dapat dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I Tahun 2026 karena belum ditetapkan target maupun realisasi, sehingga tidak tersedia data pembandingan dengan periode sebelumnya. Demikian pula pada tahun anggaran 2025 untuk periode yang sama, perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini juga belum dilakukan. Dengan kondisi tersebut, perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB tidak dapat disajikan karena belum terdapat persentase capaian indikator kinerja pada seluruh UPT. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap indikator dimaksud masih menunggu penetapan target dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan tetap melakukan monitoring hasil rekomendasi maupun tindak lanjut.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan I tahun 2026 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar NKPA tercapai optimal.

IK-19: Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi, meliputi:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. Dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan.
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. Dimensi kompetensi yang digunakan terdiri atas bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal and nonklasikal.
3. Kinerja diukur dari indikator penilaian kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Prilaku kerja.
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 37. Capaian Indikator: Indeks profesionalitas ASN

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	81,80	0

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I Tahun 2026 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2025 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Sebagai tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya, pada periode sekarang BPBAP Ujung Batee melakukan sosialisasi kepada ASN untuk mengikuti diklat maupun seminar yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pemantauan terhadap ketersediaan kegiatan pelatihan dilakukan secara rutin melalui berbagai media, dan ASN diarahkan mengikuti kegiatan yang mendukung kebutuhan organisasi. Dengan langkah ini, rekomendasi yang diberikan dapat diimplementasikan secara konsisten sekaligus mendukung peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Masih adanya ASN BPAP Ujung Batee yang belum mengikuti pelatihan baik offline maupun online.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh ASN untuk mengikuti pelatihan secara rutin setiap bulan. Pelatihan dilaksanakan baik secara online maupun offline, sehingga seluruh pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Program ini bertujuan mendukung pengembangan kompetensi ASN serta memastikan kualitas kinerja organisasi tetap terjaga.

IK-20: Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPAP Ujung Batee

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan arsip dinamis: penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip.
2. Sumber daya kearsipan: sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana.

Tabel 38. Capaian Indikator: Nilai pengawasan kearsipan internal

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	81	0

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dapat dihitung capaian kinerjanya pada periode Triwulan I Tahun 2026 karena belum ditetapkan target maupun realisasi, sehingga tidak tersedia data pembandingan dengan periode sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada tahun anggaran 2025, di mana perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan belum dilakukan. Dengan demikian, perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB tidak dapat disajikan karena belum terdapat pengukuran atau penilaian persentase capaian indikator kinerja pada seluruh UPT. Evaluasi terhadap indikator ini baru dapat dilakukan setelah target ditetapkan dan kegiatan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian

kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Sampai dengan periode Januari–Maret 2026 telah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mendukung optimalisasi pengawasan kearsipan, serta tercatat penciptaan arsip sebanyak 305 arsip.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, kegiatan pemusnahan arsip belum dilaksanakan. Selain itu, belum tersedia petugas arsiparis yang tetap, serta fasilitas dan prasarana kearsipan masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di BPBAP Ujung Batee masih menghadapi kendala, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana yang memadai agar pengelolaan arsip dapat berjalan sesuai ketentuan dan mendukung kinerja organisasi.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Sebagai tindak lanjut atas kondisi kearsipan yang masih belum optimal, langkah yang dilakukan pada periode sekarang meliputi pengusulan Daftar Arsip Musnah sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan perekrutan petugas arsiparis untuk memastikan adanya tenaga khusus yang menangani pengelolaan arsip, serta menyediakan fasilitas pendukung kearsipan seperti rak dan box arsip. Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang ada, meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, dan mendukung kelancaran kinerja organisasi secara keseluruhan

IK-21: Rencana umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAP Ujung Batee

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Tabel 39. Capaian Indikator: Persentase rencana umum pengadaan

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	77	100	129,87	0	77	129,87

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Realisasi capaian indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 100% dari target triwulanan sebesar 77%, atau setara dengan 129,87% jika dibandingkan dengan target tahunan. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2025 karena pada saat itu belum terdapat target maupun realisasi yang ditetapkan. Perbandingan realisasi persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP antar UPT Air Payau Lingkup DJPB menunjukkan persentase yang sama yaitu tercapai 100 % untuk semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan koordinasi, monitoring terhadap pelaksanaan serta melengkapi dan menginput paket pengadaan barang/jasa dengan cermat.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama Triwulan I Tahun 2026 tidak ditemukan permasalahan yang signifikan dalam pencapaian indikator kinerja ini, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Rencana aksi pada periode selanjutnya difokuskan pada peningkatan tata kelola pengadaan barang/jasa, yaitu dengan melakukan koordinasi yang baik antarunit, melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan, serta mengusahakan kelengkapan dan ketepatan dalam menginput paket pengadaan barang/jasa. Selain itu, akan dilakukan pemantauan terhadap kemungkinan perubahan paket pengadaan di BPBAP Ujung Batee agar proses pengadaan tetap berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian kinerja organisasi.

IK-22: Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee

Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari perencanaan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur. Proses tersebut dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu (1) dokumen kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN); (2) dokumen pengembangan kompetensi ASN, yang terdiri dari layanan tugas belajar, izin belajar, ujian dinas; (3) dokumen layanan mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses

peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (4) dokumen layanan ketatausahaan ASN, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan, dan (5) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN.

Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma).

Tabel 40. Capaian Indikator: Indeks pengelolaan SDM

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	4	0

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dapat dihitung capaian kinerjanya pada periode Triwulan I Tahun 2026 karena belum ditetapkan target maupun realisasi, sehingga tidak tersedia data pembandingan dengan periode sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada tahun anggaran 2025, di mana perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan belum dilakukan. Dengan demikian, perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB tidak dapat disajikan karena belum terdapat pengukuran atau penilaian persentase capaian indikator kinerja pada seluruh UPT. Evaluasi terhadap indikator ini baru dapat dilakukan setelah target ditetapkan dan kegiatan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mendukung optimalisasi indeks pengelolaan SDM, dengan kegiatan utama berupa pengusulan dokumen kebutuhan ASN, pengusulan calon peserta ujian peningkatan pendidikan, serta layanan mutasi pegawai.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat kendala dalam proses pengusulan kenaikan pangkat ASN, sehingga pelaksanaan indikator kinerja terkait belum dapat berjalan optimal. Kendala ini perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi yang lebih intensif, penyempurnaan mekanisme

administrasi, serta monitoring berkelanjutan agar proses pengusulan dapat terlaksana sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat kendala dalam pengusulan kenaikan pangkat ASN, sehingga sebagai tindak lanjut dilakukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian di Pusat untuk memperlancar proses administrasi dan memastikan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan

IK-23: Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan *good governance*. Memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perhitungan nilai keterbukaan informasi publik dilakukan dengan memperhatikan indikator penilaian yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Selain presentasi uji publik, persentase penilaian terbesar dari instrument penilaian mandiri yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian dalam hal ini Biro Humas – Sekretariat Jenderal KKP atau *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ).

Tabel 41. Capaian Indikator: Pelayanan keterbukaan informasi publik

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	81	0

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dapat dihitung capaian kinerjanya pada periode Triwulan I Tahun 2026 karena belum ditetapkan target maupun realisasi, sehingga tidak tersedia data pembandingan dengan periode sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada tahun anggaran 2025, di mana perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan belum dilakukan. Dengan demikian, perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB tidak dapat disajikan karena belum terdapat pengukuran atau penilaian persentase capaian indikator kinerja pada seluruh UPT. Evaluasi terhadap indikator ini baru dapat dilakukan setelah target ditetapkan dan kegiatan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Hingga Maret 2026, BPBAP Ujung Batee menyampaikan pemberitaan positif melalui media sosial terkait

kegiatan magang, kunjungan edukasi, field trip, dan produksi, yang mendapat respon baik dari masyarakat.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama Triwulan I tahun 2026 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Pada periode selanjutnya akan tetap dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pemenuhan dokumen keterbukaan informasi publik tercapai optimal, serta dilanjutkan dengan penyebaran berita positif mengenai berbagai kegiatan di BPBAP Ujung Batee.

IK-24: Pelayanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee

Layanan perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya. Selain pelayanan internal dalam kegiatan layanan perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja.

Tabel 42. Capaian Indikator: Persentase layanan perkantoran

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
80	100	125	100	100	100	100	100	100

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Realisasi layanan perkantoran pada Triwulan I Tahun 2026 tercapai 100%, berbeda dengan capaian pada periode yang sama Tahun 2025 sebesar 125%. Perbandingan realisasi persentase layanan perkantoran antar UPT Air Payau Lingkup DJPB menunjukkan persentase yang sama yaitu tercapai 100 % untuk semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee pada tahun 2026 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 10,548,204,000 dengan realisasi mencapai Rp 3,647,744,304 atau 34.58 %. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 komponen yaitu 1) Gaji dan tunjangan sebesar Rp 8,066,483,000; dan 2) Operasional dan pemeliharaan sebesar Rp 2,481,721,000.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Pada Triwulan I Tahun 2026, layanan perkantoran di BPBAP Ujung Batee telah dilaksanakan dengan baik melalui koordinasi dan monitoring, meliputi dokumentasi pelayanan administrasi pimpinan berupa rapat (online dan offline) serta kunjungan stakeholder, pembayaran gaji dan tunjangan kinerja karyawan, serta pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kerja.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama Triwulan I Tahun 2026 tidak terdapat kendala dalam pemenuhan pencapaian indikator kinerja, sehingga seluruh target dapat terlaksana dengan optimal.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Layanan perkantoran untuk masing-masing kegiatan akan tetap dilanjutkan guna memastikan target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi secara konsisten dan optimal.

IK-25: Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK Satker BPBAP Ujung Batee

Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah suatu predikat yang diperoleh satker yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50;
4. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 (survei 3,20).

Nilai minimal yang diperoleh merupakan hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

Tabel 43. Capaian Indikator: Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk menuju WBK

Triwulan I 2025			Triwulan I 2026			Perbandingan 2026 dengan 2025 (%)	Target 2026	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
0	0	0	0	0	0	0	76	0

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I Tahun 2025 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2024 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan tetap melaksanakan monitoring terhadap hasil rekomendasi maupun tindak lanjut, sementara pada periode Triwulan I Tahun 2026 kegiatan pemenuhan dokumen WBK masih dalam proses update dan hingga saat ini belum terdapat hasil penilaian terbaru terkait pemenuhan dokumen Zona Integritas.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Pada Triwulan I Tahun 2026, dokumen Zona Integritas/WBK untuk TW I belum dilakukan update sehingga diperlukan tindak lanjut melalui pendataan rekapan data dan rapat rutin mingguan di setiap area guna memastikan pemenuhan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Monitoring dan evaluasi tetap dilaksanakan agar pembangunan zona integritas di BPBAP Ujung Batee sesuai ekspektasi, dengan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku melalui pendataan rekapan data untuk mengetahui area yang belum melakukan update dokumen, serta rapat rutin mingguan di setiap area guna memastikan update dan pemenuhan dokumen WBK

3.3. Kinerja Anggaran

Pada tahun 2024 terjadi perubahan nomenklatur Ditjen Perikanan Budidaya sehingga berpengaruh terhadap struktur aktivitas/kegiatan pada sistem penganggaran. Sehingga mulai tahun 2025 tidak ada lagi kegiatan pengelolaan perbenihan, kawasan dan kesehatan ikan, produksi dan usaha, serta pakan dan obat ikan, digantikan dengan pengelolaan budi daya ikan air payau, ikan air laut, dan ikan air tawar.

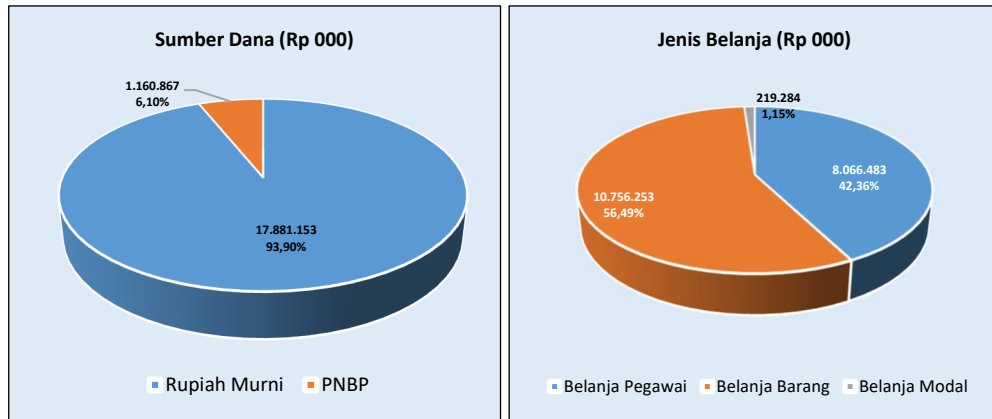
Alokasi APBN tahun 2026 pada BPBAP Ujung Batee semula sebesar Rp 20.665.614.000, kemudian seiring berjalannya waktu mengalami perubahan sehingga pagu anggaran terakhir menjadi Rp 19.042.020.000. Sedangkan pada tahun 2025 mengelola anggaran mencapai sebesar Rp 16.926.432.000. Jika dibandingkan, alokasi anggaran tahun 2022-2026 mengalami penurunan. Tahun 2025 menjadi pagu anggaran terendah dalam rentang tahun anggaran 2022 sampai dengan 2026.

Tabel 44. Pagu anggaran tahun 2022-2026

Aktivitas/Kegiatan	Anggaran 2026 (Rp 000)	Anggaran 2025 (Rp 000)	Anggaran 2024 (Rp 000)	Anggaran 2023 (Rp 000)	Anggaran 2022 (Rp 000)
Pengelolaan Perbenihan Ikan (2344)	0	0	3.859.888	4.506.581	2.712.761
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan (2345)	0	0	1.234.433	11.472.463	2.093.262
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan (2346)	0	0	6.852.000	7.429.000	3.500.000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PB (2348)	10.609.906	10.720.191	11.964.619	11.244.282	10.675.751
Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan (5747)	0	0	744.370	659.576	592.324
Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau (7022)	2.316.650	2.917.448	0	0	0
Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut (7023)	912.276	174.722	0	0	0
Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar (7024)	77.748	3.114.071	0	0	0
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya (7941)	5.125.440		0	0	0
Total Anggaran	19.042.020	16.926.432	24.655.310	35.311.902	19.574.098

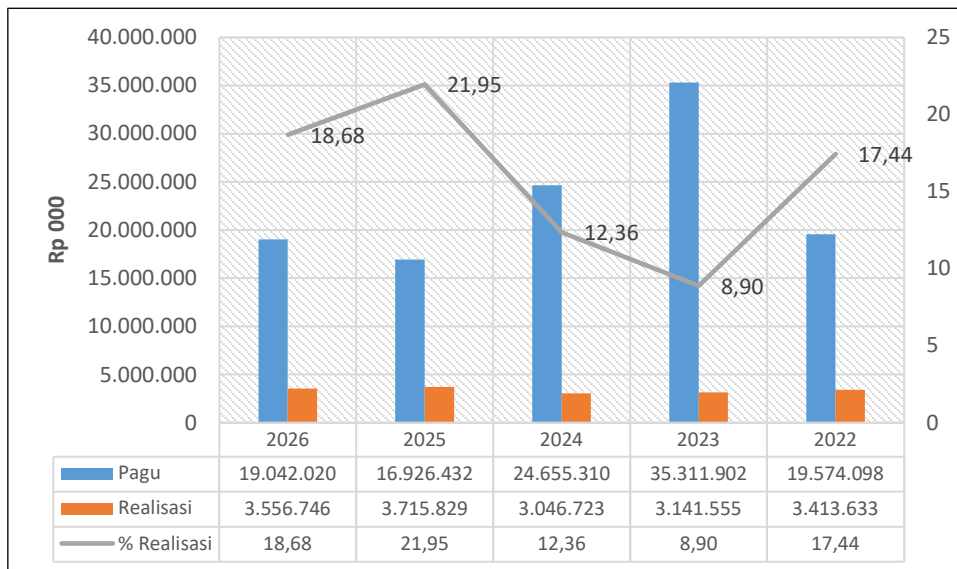
Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PB (2348) menjadi yang tertinggi alokasi anggarannya selama periode 2022-2026. Sedangkan kegiatan Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan (5747) sebagai terendah sepanjang tahun 2022-2024, dan Pengelolaan Budi Daya Air Tawar pada tahun 2026.

Tahun 2026 belanja barang mendapatkan alokasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pegawai maupun belanja modal, yaitu 56,49 % dari total anggaran. Selain itu sumber dana belanja terdiri dari Rupiah Murni sebesar 93,9 % sedangkan sumber dana dari PNPB hanya sebesar 6,1 %, dan ada sumber dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) mencapai 8,86 %.



Gambar 6. Alokasi jenis belanja dan sumber dana belanja tahun 2026

Data *time series* 2022-2026 menunjukkan pagu anggaran setiap tahunnya mengalami naik turun, seperti ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022-2026

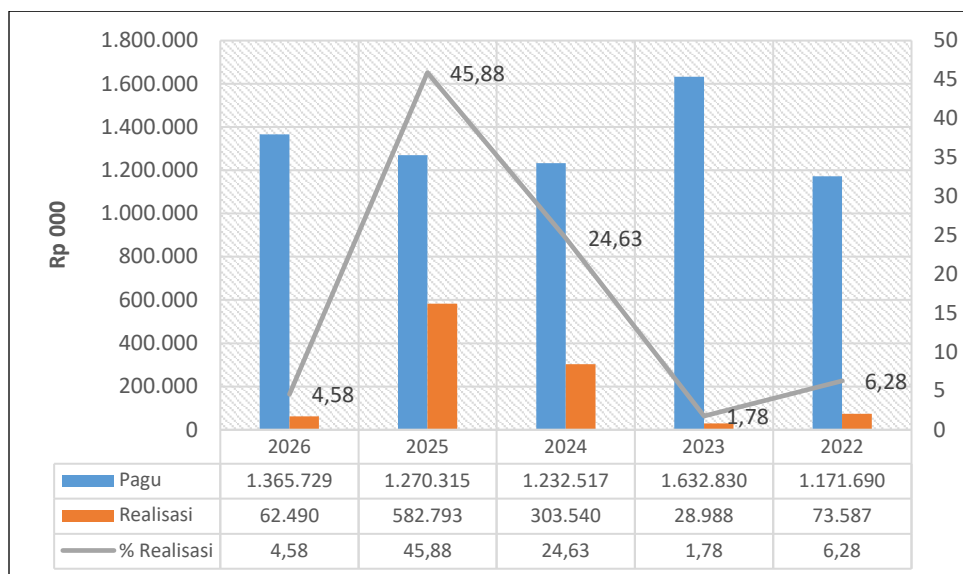
Selama periode pengamatan nilai pagu anggaran tertinggi pada tahun 2023 mencapai sebesar 35 milyar dan terendah pada 2025 hanya sebesar 16 milyar. Sedangkan realisasi anggaran triwulan I tertinggi pada tahun 2025 mencapai 21,95 % dari total pagu anggaran 16 miliar rupiah, sementara realisasi triwulan I terendah pada tahun 2023 hanya sebesar 8,9 % dari total pagu anggaran 35 milyar rupiah. Rendahnya realisasi anggaran triwulan I pada tahun 2023 disebabkan adanya pagu anggaran mencapai 35 milyar tertinggi diantara tahun lainnya.

Selanjutnya dari sisi penerimaan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dasar hukum pemungutan PNBP pada BPAP Ujung Batee yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sumber PNBP BPBAP Ujung Batee berasal dari:

- 1) Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yaitu PNBP yang berasal dari pungutan perikanan. Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha budidaya Perikanan.
- 2) PNBP Non SDA yaitu PNBP yang berasal dari penjualan hasil usaha budidaya dan imbalan jasa UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. PNBP ini terdiri dari: (i) Penjualan hasil Perikanan Budidaya; (ii) Imbal Jasa Teknologi; (iii) Jasa Desiminasi; (iv) Jasa Penggunaan Laboratorium; (v) Jasa Penggunaan fasilitas; (vi) Jasa Fasilitas Lainnya; dan (vii) Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Data *time series* 2022-2026 menunjukkan target PNBP mengalami naik turun, seperti ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 8. Target dan Realisasi PNBP Tahun 2022-2026

Tahun 2026 BPBAP Ujung Batee ditargetkan PNBP sebesar Rp 1.365.729.000, dengan realisasi mencapai 4,58 % atau Rp 62.489.916. Selama tahun 2022-2026 target PNBP mengalami penurunan dan peningkatan, dimana selama 2023 mengalami kenaikan target, kemudian tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan, selanjutnya meningkat lagi di tahun 2026. Target PNBP tertinggi pada tahun 2023 mencapai sebesar 1,6 milyar rupiah sedangkan terendah tahun 2022 hanya sebesar 1,1 milyar. Sementara itu realisasi triwulan I tertinggi pada tahun 2025 mampu mencapai hingga 45,88 % sementara realisasi terendah pada triwulan I pada tahun 2023 yaitu hanya mampu mencapai 1,78 %.

BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) BPAP Ujung Batee Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian indikator kinerja selama Januari s.d Maret 2026. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Berdasarkan evaluasi rencana aksi BPAP Ujung Batee Triwulan I Tahun 2026, dari total 25 indikator kinerja, sebanyak 6 indikator kinerja telah memenuhi target dan hanya 2 indikator kinerja yang belum memenuhi target, sedangkan sisanya sebanyak 17 indikator belum ada capaian karena tidak ditargetkan pada triwulan I.

Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang optimal;
2. Memperkuat koordinasi dengan instansi pusat maupun instansi lain, khususnya pada pelaksanaan kegiatan yang akan berpengaruh pada capaian indikator kinerja;
3. Monitoring dan evaluasi melalui rapat pengendalian rutin pada setiap minggu pertama bulan berjalan, dengan harapan dapat diambil rencana aksi dan dilakukan tindak mengatasi kendala-kendala.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL dijnpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wawan Cahyono Ashuri**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1. Sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air payau oleh BPBAP Ujung Batee (Sampel)	200
	2. Calon induk unggul udang yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee (Ekor)	2.136
	3. Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee (Ekor)	1.207.320
	4. Benih ikan udang yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee (Ekor)	11.472.302
	5. Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji oleh BPBAP Ujung Batee (Sampel)	60
	6. Sampel surveilan resistensi antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau yang diuji oleh BPBAP Ujung Batee (Sampel)	25
	7. Calon induk unggul ikan air payau yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee (Ekor)	866
	8. Calon induk unggul udang yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee (Ekor)	20.515
	9. Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh BPBAP Ujung Batee (Kg)	3.448
	10. Benih ikan air payau yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee (Ekor)	300.000
	11. Benih udang yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee (Ekor)	4.500.000
2. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	12. Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee (Ekor)	217.388

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	13. Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBAP Ujung Batee (Unit)	1
4. Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	14. Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee (Unit)	23
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di BPBAP Ujung Batee	15. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	86
	16. Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	84,20
	17. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	92,10
	18. Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	71,75
	19. Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)	81,50
	20. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	81
	21. Rencana umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	77
	22. Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)	4
	23. Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	≥ 81
	24. Pelayanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100
	25. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	76

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	2.316.650.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	912.276.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	77.748.000
4.	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	5.125.440.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	10.609.906.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee Tahun 2026		19.042.020.000

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;
Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Satuan Kerja : 567385 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	18,693,759,000	180,610,000	1,603,971,415	1,968,850,426	3,572,821,841	19.11 %	14,940,327,159
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	8,083,853,000	175,249,000	415,066,833	518,526,850	933,593,683	11.55 %	6,975,010,317
HB.7022 Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	1,968,389,000	46,136,000	254,599,833	345,724,900	600,324,733	30.50 %	1,321,928,267
BJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit	56,000,000	0	11,735,500	19,513,800	31,249,300	55.80 %	24,750,700
BJC.001 Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Payau	56,000,000	0	11,735,500	19,513,800	31,249,300	55.80 %	24,750,700
QEL Bantuan Hewan	709,204,000	4,488,000	139,136,833	122,949,400	262,086,233	36.95 %	442,629,767
QEL.U02 Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	85,897,000	574,000	1,991,000	32,265,000	34,256,000	39.88 %	51,067,000
QEL.U03 Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	207,573,000	1,498,000	17,873,062	38,061,380	55,934,442	26.95 %	150,140,558
QEL.U04 Benih Ikan Udang yang disalurkan ke masyarakat	415,734,000	2,416,000	119,272,771	52,623,020	171,895,791	41.35 %	241,422,209
QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit	68,698,000	41,648,000	0	3,687,420	3,687,420	5.37 %	23,362,580
QJC.002 Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang diuji	57,576,000	34,872,000	0	0	0	0.00 %	22,704,000
QJC.U03 Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji	11,122,000	6,776,000	0	3,687,420	3,687,420	33.15 %	658,580
RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	1,134,487,000	0	103,727,500	199,574,280	303,301,780	26.73 %	831,185,220
RAL.001 Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi	61,831,000	0	0	9,620,000	9,620,000	15.56 %	52,211,000
RAL.002 Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi	832,907,000	0	100,371,000	136,750,000	237,121,000	28.47 %	595,786,000
RAL.003 Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	35,000,000	0	0	4,085,000	4,085,000	11.67 %	30,915,000
RAL.004 Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi	47,250,000	0	0	21,514,000	21,514,000	45.53 %	25,736,000
RAL.005 Benih Udang yang Diproduksi	157,499,000	0	3,356,500	27,605,280	30,961,780	19.66 %	126,537,220
HB.7023 Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	912,276,000	4,110,000	156,639,000	140,740,042	297,379,042	32.60 %	610,786,958
QEL Bantuan Hewan	912,276,000	4,110,000	156,639,000	140,740,042	297,379,042	32.60 %	610,786,958
QEL.U04 Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	912,276,000	4,110,000	156,639,000	140,740,042	297,379,042	32.60 %	610,786,958
HB.7024 Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	77,748,000	7,283,000	0	32,061,908	32,061,908	41.24 %	38,403,092
RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	77,748,000	7,283,000	0	32,061,908	32,061,908	41.24 %	38,403,092
RAL.004 Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	77,748,000	7,283,000	0	32,061,908	32,061,908	41.24 %	38,403,092
HB.7941 Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	5,125,440,000	117,720,000	3,828,000	0	3,828,000	0.07 %	5,003,892,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2026
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;
Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Satuan Kerja : 567385 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QEO Bantuan Produk dan Peralatan	5,125,440,000	117,720,000	3,828,000	0	3,828,000	0.07 %	5,003,892,000
QEO.003 Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	5,125,440,000	117,720,000	3,828,000	0	3,828,000	0.07 %	5,003,892,000
WA Program Dukungan Manajemen	10,609,906,000	5,361,000	1,188,904,582	1,450,323,576	2,639,228,158	24.88 %	7,965,316,842
WA.2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	10,609,906,000	5,361,000	1,188,904,582	1,450,323,576	2,639,228,158	24.88 %	7,965,316,842
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,585,306,000	30,000	1,185,713,082	1,437,439,306	2,623,152,388	24.78 %	7,962,123,612
EBA.962 Layanan Umum	30,610,000	27,000	18,913,339	6,786,800	25,700,139	83.96 %	4,882,861
EBA.994 Layanan Perkantoran	10,548,204,000	0	1,163,424,743	1,429,262,506	2,592,687,249	24.58 %	7,955,516,751
EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II Ke Bawah)	6,492,000	3,000	3,375,000	1,390,000	4,765,000	73.40 %	1,724,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	24,600,000	5,331,000	3,191,500	12,884,270	16,075,770	65.35 %	3,193,230
EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke Bawah)	17,000,000	4,115,000	0	12,884,270	12,884,270	75.79 %	730
EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke Bawah)	7,600,000	1,216,000	3,191,500	0	3,191,500	41.99 %	3,192,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

KERTAS KERJA VERIFIKASI

Unit Kerja : BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
Bulan : Maret - 2026
NKO Awal : 109.22
NKO Verifikasi : 109.22

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
1	IKSK.1	Sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air payau oleh BPBAP Ujung Batee Data Dukung1	Sampel	Maximize	200,00	33,00	199,00	199,00	Valid	capaian data dukung sudah sesuai
2	IKSK.10	Benih ikan air payau yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee	Ekor	Maximize	300.000,00	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan triwulanan
3	IKSK.11	Benih udang yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee Data Dukung1	Ekor	Maximize	4.500.000,00	1.000.000,00	967.000,00	967.000,00	Valid	capaian data dukung sudah sesuai
4	IKSK.2	Calon induk unggul udang yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	Ekor	Maximize	2.136,00	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan tahunan
5	IKSK.3	Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	Ekor	Maximize	1.207.320,00	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan triwulanan
6	IKSK.4	Benih ikan udang yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee Data Dukung1	Ekor	Maximize	11.472.302,00	2.800.000,00	2.799.080,00	2.799.080,00	Valid	capaian data dukung sudah sesuai
7	IKSK.5	Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji oleh BPBAP Ujung Batee Data Dukung1	Sampel	Maximize	60,00	12,00	12,00	12,00	Valid	capaian data dukung sudah sesuai
8	IKSK.6	Sampel surveilan resistensi antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau yang diuji oleh BPBAP Ujung Batee Data Dukung1	Sampel	Maximize	25,00	5,00	12,00	12,00	Valid	capaian data dukung sudah sesuai
9	IKSK.7	Calon induk unggul ikan air payau yang diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee	Ekor	Maximize	866,00	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan tahunan
10	IKSK.8	Calon induk unggul udang yang Diproduksi oleh BPBAP Ujung Batee	Ekor	Maximize	20.515,00	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan tahunan
11	IKSK.9	Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh BPBAP Ujung Batee	Kg	Maximize	3.448,00	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan tahunan
12	IKSK.02.1	Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	Ekor	Maximize	217.388,00	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan triwulanan
13	IKSK.03.1	Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBAP Ujung Batee	Unit	Maximize	1,00	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan tahunan
14	IKSK.04.1	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Ujung Batee	Unit	Maximize	23,00	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan triwulanan
15	IKSK.05.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee Data Dukung1	Persen	Maximize	86,00	86,00	97,46	97,46	Valid	capaian data dukung sudah sesuai
16	IKSK.05.10	Pelayanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee Data Dukung1	Persen	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	Valid	capaian data dukung sudah sesuai
17	IKSK.05.11	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK Satker BPBAP Ujung Batee	Nilai	Maximize	76,00	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan tahunan
18	IKSK.05.2	Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee	Nilai	Maximize	84,20	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan tahunan
19	IKSK.05.3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee	Nilai	Maximize	92,10	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan semesteran
20	IKSK.05.4	Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee	Nilai	Maximize	71,75	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan tahunan
21	IKSK.05.5	Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee	Indeks	Maximize	81,50	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan semesteran

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
22	IKSK.05.6	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee	Nilai	Maximize	81,00	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan tahunan
23	IKSK.05.7	Rencana umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAP Ujung Batee Data Dukung1	Persen	Maximize	77,00	77,00	100,00	100,00	Valid	capaian data dukung sudah sesuai
24	IKSK.05.8	Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee	Indeks	Maximize	4,00	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan tahunan
25	IKSK.05.9	Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee	Nilai	Maximize	81,00	0,00		0,00	Valid	penilaian dilakukan tahunan
Kesimpulan										

Perwakilan Unit Kerja	Nama	Email	
Tim Verifikasi	Nama	Email	

Aquaculture is future



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Jalan Laksamana Malahayati Km. 16 Ujung Batee, Mesjid Raya, Kab Aceh Besar, Prov Aceh

Telepon : 08116811448 | email : tu.bbapub@gmail.com

<https://kkp.go.id/djpb/bpbapujungbatee>